

The background of the title section is a blue-tinted photograph showing the silhouettes of three workers on a high-voltage power line tower. The workers are positioned at different heights, and the complex lattice structure of the tower is visible against a lighter sky.

Environmental and Social Management Plan Monitoring Report 2023

**PT PLN (Persero)
East Java Distribution Main Unit**



CONTENTS

CONTENTS	1
FIGURES	2
GLOSSARY	3
PREFACE	4
APPROVAL SHEET	5
Chapter I Introduction	6
1.1. Purpose of the Monitoring Report 2023	10
1.2. Brief Project Description	10
1.3. Compliance with National Regulation	11
1.3.1 UKL UPL Documents for Warehouse and Project Activities	12
1.3.2 Hazardous Waste Storage Permit	12
1.4. Environmental and Social Management Plan (ESMP)	12
Chapter II Results	14
2.1. Monitoring the Pre-Construction Period	14
2.2. Monitoring the Construction Period	16
2.3. Monitoring the Operation Period	18
2.4. Warehouse Monitoring Results	18
2.5. Training, Stakeholders Engagement and Grievance Redress Mechanism (GRM) Implementation	20
2.6. Summary of Key Findings	24
Chapter III Conclusion and Recommendation	25
Appendix 1: UID Jatim's Detailed Business Location	26
Appendix 2: ESMP Matrix	32
Appendix 3: List of Environmental Approvals and Permits	69
Appendix 4: List of Indonesia's Environmental and Social Regulations	69
Appendix 5: List of Standard Operational Procedure in Distribution Lines Construction	75
Appendix 6: Wipe Test Laboratory Test	76
Appendix 7: Screening Form	79
Appendix 8: ROW Safety Distance and Socialisation Notes	87
Appendix 9: Sign, Personal Protective Equipment	88
Appendix 10: Material arrangement with 5S rules	89
Appendix 11: No oil seepage from transformation and empty transformation	89

FIGURES

Figure 1. The Working Area of PLN UID Jatim	10
Figure 2. RoW dan Safe Distance on Distribution Power Lines	16
Figure 3. Written Agreement	16
Figure 4. Warning Attention Board	17
Figure 5. Vendor HSE's commitment	17
Figure 6. CSMS certificate	18
Figure 7. UID Jatim Transformer Warehouse Condition	18
Figure 8. Hazardous Waste Storage at UP3 Pasuruan	19
Figure 9. Transformer Offline Oil Sampling for PCBs Test	19
Figure 10. Hazardous Waste Storage	20
Figure 11. INSPEKTA Monitoring Report	20
Figure 12. The top-ten major diseases within PLN employees	21
Figure 13. Emergency response simulations	21
Figure 14. CSR Programs at PLN UID Jatim	22
Figure 15. The Total of Interferences in 2023	22
Figure 16. PLN Mobile Application and Instagram	23

GLOSSARY

AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
AMDAL	<i>Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</i> (Environmental Impact Assessment)
DPLH	<i>Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> (Environmental Management Document)
ESMP	Environmental and Social Management Plan
ESP	Environmental and Social Policy
ESS	Environmental and Social Standard
kV	Kilovolt
MW	Mega Watt
PLN	<i>Perusahaan Listrik Negara</i> (Indonesia's National Electricity Company)
Persero	Indonesian Enterprise
ROW	Right of Way
SPPL	<i>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan</i> (Statement of Environmental Management and Monitoring Capability)
UID	<i>Unit Induk Distribusi</i> (a unit business of PLN focuses on electric power distribution)
ULP	<i>Unit Layanan Pelanggan</i> (a sub unit below UP3 or a sub-sub unit below UID, responsible to support customer services which include supply turn-on and disconnection, billing and payment collection, and other customer services during electricity distribution in smaller areas)
UKL	<i>Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> (Environmental Management Efforts)
UPL	<i>Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup</i> (Environmental Monitoring Efforts)
UP2D	<i>Unit Pelaksana Pengatur Distribusi</i> (a sub unit below UID, responsible to manage the reliability of the 20 kV distribution system to supply electrical energy continuously without causing disconnection to consumer)
UP2K	<i>Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan</i> (a sub unit below UID, responsible to manage electrical distribution system projects to serve isolated rural areas)
UP3	<i>Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan</i> (a sub unit below UID, responsible to manage customer services, including electric distribution network management, electricity sales, and service quality improvement)

PREFACE

In the implementation of AIIB – PLN Strengthening Distribution Network in East Java and Bali Project, there are several document requirements to comply with the AIIB environmental and social protection standards and Indonesian legislation. In preparation, the Bank and PT PLN have approved the Environmental and Social Management Plan Framework document, which is general in nature and serves as an umbrella for making this more detailed protection document of Environmental and Social Management Plan (ESMP).

PT PLN (Persero) Distribution Main Unit – UID Jatim has a high commitment in the effort to conserve the environment. Therefore, planning, implementing and reporting the implementation and monitoring of the ESMP activities must be carried out periodically as prepared in this document, the ESMP Monitoring Report 2023 UID Jatim. The full report is written in English, with a summary in Indonesian.

We would like to thank all of those who have assisted in the preparation of this PT PLN (Persero) UID Jatim ESMP 2023 Monitoring Report document.

Surabaya 28th June 2024



AGUS KUSWARDYO

APPROVAL SHEET

■

Environmental and Social Management Plan (ESMP)

Monitoring Report – 2023

PT PLN (Persero) East Java Main Unit – Distribution

AIIB – PLN Strengthening Distribution Networks in East Java and Bali Project

Surabaya, 28th June 2024

GENERAL MANAGER


AGUS KUSWARDYO

Ringkasan Laporan Monitoring ESMP 2023 UID Jatim

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Tujuan Laporan Monitoring ESMP 2023

Laporan ini dibuat untuk menampilkan kegiatan mitigasi dan monitoring untuk aspek perlindungan lingkungan dan sosial Proyek AIIB – PLN Penguatan Jaringan Distribusi di Jawa Timur (Jatim) dan Bali 2023.

1.2. Penjelasan Singkat tentang Proyek

PLN UID Jatim sejak 1972 bertanggung jawab untuk pengelolaan sistem distribusi tenaga listrik di Provinsi Jawa Timur yang mencakup wilayah perkotaan, perdesaan dan kepulauan. Secara organisasional PLN UID Jatim memiliki 16 UP3, UP2D, UP2K, and 112 ULP yang melayani lebih dari 12 juta pelanggan individual, perusahaan, pabrik dan pemerintahan. Kapasitas PLN UID Jawa Timur sampai Desember 2023 adalah 9.999 MW, dengan *peak load* 6.288 MW dan *reserve* 2.317 MW.

Kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Proyek AIIB – PLN Penguatan Jaringan Distribusi di Jawa Timur dan Bali adalah:

1. Pengiriman ke lokasi dan penyimpanan sementara di lokasi material, termasuk trafo, saluran listrik distribusi, tiang pancang;
2. Pemasangan dan peningkatan jaringan distribusi, termasuk pembersihan ruang bebas hambatan – jalur kabel – ROW; pekerjaan sipil seperti penggalian pondasi untuk tiang, penggalian dan atau pengeboran; pendirian tiang; rangkaian kabel listrik; pemasangan dan penggantian trafo;
3. Penyimpanan, penanganan dan pembuangan trafo;
4. Sambungan ke jaringan dan ke rumah tangga, termasuk pemasangan kotak meteran pelanggan dan pemutus sirkuit); dan
5. Pemeliharaan jalur distribusi seperti pemotongan dahan pohon.

Proyek ini ditetapkan sebagai Kategori B berdasarkan Kebijakan Lingkungan dan Sosial – ESP AIIB, dengan penerapan Standar Lingkungan dan Sosial (ESS) 1 – Penilaian dan Manajemen Lingkungan dan Sosial. ESS 2 – Pemukiman Kembali Non-sukarela termasuk pembebasan lahan dan ESS 3 – Masyarakat Adat tidak berlaku karena sub proyek yang dibiayai tidak memerlukan pembebasan lahan atau kegiatan yang berdampak buruk bagi masyarakat adat. Karena proyek dan sub proyek dinyatakan sebagai Kategori B dan jalur distribusi diklasifikasikan sebagai Kategori B dan hanya memerlukan UKL-UPL atau SPPL, sub proyek yang membutuhkan AMDAL tidak masuk pembiayaan.

1.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial – ESMP

Dalam Proyek ini ESMP disusun sebagai panduan melakukan perlindungan lingkungan dan sosial sesuai dengan standar AIIB. Tujuan pembuatan ESMP adalah untuk memastikan pelaksanaan, monitoring dan peningkatan langkah-langkah mitigasi yang teridentifikasi untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif di setiap kegiatan dalam setiap tahapan proyek – pra konstruksi, konstruksi dan operasional, serta membahas dampak lingkungan dan sosial yang tidak diharapkan atau tidak terduga yang mungkin timbul selama tahap konstruksi dan operasional.

Bab 2. Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahun 2023 PLN UID Jatim melakukan berbagai sub-proyek untuk peningkatan dan efisiensi jaringan listrik tegangan menengah dan rendah, konstruksi feeder untuk gardu baru, penggantian material dan transformer, instalasi LBS, recloser, DS, JTM, JTR, APP dan meteran 1 phase dan 3 phase, dengan menerapkan K3L dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan K3L dan aspek sosial di PLN UID Jatim ada di bawah General Manager UID, Bapak Agus Kuswardoyo. Pelaksanaan, monitoring dan pelaporan harian di UID oleh Manager K3L – Keamanan, Bapak Parlan, dan di UP2 dan UP3 supervisi oleh Manager Unit, pelaksanaan harian oleh Team Leader K3L dan Keamanan.

2.1. Daftar Penapisan Lingkungan dan Sosial

Penapisan lingkungan dan sosial dilakukan di awal pelaksanaan untuk semua komponen proyek dan sub proyek yang akan dilaksanakan untuk mencegah kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui dana pinjaman AIB, dampak lingkungan dan sosial negatif yang signifikan dalam pelaksanaan proyek, dengan panduan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial AIB. PLN UID Jatim melakukan penapisan terkait habitat yang dilindungi, jarak aman, masyarakat adat, peninggalan bersejarah, dan penggunaan tanah pribadi.

2.2. Monitoring – Tahap Pra Konstruksi

Pembangunan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah dapat menyebabkan dampak pada aspek ekologis, fisik dan sosial dalam tahap pra konstruksi, karenanya sebelum memulai kegiatan, UP3 akan melakukan penapisan aspek lingkungan, lokasi perumahan masyarakat adat, peninggalan bersejarah, dan penggunaan tanah pribadi. Rencana pemotongan dahan dan cabang pohon di area jalur kabel – ROW untuk memastikan jarak aman dibuat pada tahap ini, dengan adanya peta rute ROW dan perjanjian tertulis dengan pemilik pohon mengenai ijin memotong pohon.

2.3. Monitoring – Tahap Konstruksi

Dalam Tahap Konstruksi secara umum kegiatan dilakukan oleh kontraktor sebagai pihak ketiga, dengan pengawasan K3L UID Jatim. Pihak ketiga wajib mengikuti semua peraturan pemerintah dan PLN terkait keselamatan kerja seperti sertifikat CSMS, HIRARC, ijin kerja dan Standar Prosedur Pelaksanaan untuk setiap jenis pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.4. Monitoring – Tahap Operasional

Pada Tahap Operasional, dampak yang harus dimonitor yang berasal dari kegiatan pemeliharaan misalnya adalah kemungkinan kontaminasi tanah dan badan air karena cecceran minyak saat penggantian trafo Listrik yang rusak atau perlu diganti yang dikategorikan sebagai cecceran minyak limbah berbahaya, penempatan dan pengisolasian trafo yang mengandung PCB di gudang, dan penyimpanan ATTB di gudang penyimpanan.

2.5. Monitoring – Gudang

Di PLN UID Jatim terdapat dua tipe gudang yaitu Gudang Bahan Material dan Gudang Limbah B3, yang dimiliki oleh setiap unit. Dalam Gudang Bahan Material terdapat penyimpanan kabel, MCB, trafo dan perlengkapan lainnya yang dipantau menggunakan AGO – Aplikasi Gudang Online. Dalam pelaksanaan, audit Integrated Management System (IMS) seringkali ditemukan perbedaan antara jumlah sesungguhnya di gudang dan data di aplikasi. Untuk material baru dan non LB3 disimpan di gudang terpisah dari LB3.

Gudang Limbah B3 digunakan untuk penyimpanan bahan dan limbah beracun dan berbahaya seperti minyak pelumas, baterai lama dan baru (karena keterbatasan lahan), dan kain bekas (majun). Transportasi dan pengelolaan B3 dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai ijin dari Kementrian LHK. Sebelum dibawa oleh pengelola, B3 ditempatkan di Gudang Tempat Penampungan Sementara – TPS. Di 2023 PLN UID Jatim sudah mempunyai prosedur penanganan cecceran minyak, penempatan dan pengelolaan B3 dan bahan kimia yang terintegrasi dalam Integrated Management System (IMS). Terdapat 18 Gudang TPS Limbah B3 di PLN UID Jatim yang memiliki atap, lantai semen, sistem pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan parit keliling dan sump pit, pertolongan pertama, pemadam api sesuai perundangan. Pemeliharaan gudang secara berkala dilakukan untuk menjaga

kualitas bangunan sesuai standar. Semua TPS LB3 PLN UID Jatim telah mendapat ijin dari pemerintah, sebagaimana bisa dilihat pada Lampiran 3.

Salah satu limbah B3 yang harus mendapat perhatian khusus adalah trafo yang minyaknya mengandung PCBs yang dilarang penggunaannya oleh pemerintah dan dalam proyek ini. Trafo dengan minyak mengandung PCBs bisa ditemukan pada trafo kapasitas lebih dari 100kVA yang digunakan (diproduksi) sebelum 1997. PLN UID Jatim telah melaksanakan inventarisasi terhadap trafo offline yang diduga mengandung PCB yang berada di Gudang ATTB dan di tahun 2023 melakukan tes uji usap terhadap 135 sampel. Hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi PCBs.

2.6. Monitoring – K3L

Dalam pelaksanaan kegiatan PLN UID Jatim terdapat resiko tinggi terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. PLN Pusat membuat aplikasi Inspekta sebagai alat pantau K3L saat bekerja seperti kondisi dan tindakan yang tidak aman. Aplikasi ini dimiliki oleh setiap karyawan PLN untuk melaporkan kondisi dan tindakan yang tidak aman berkaitan dengan K3L, dimonitor oleh PLN Pusat untuk penyelesaian. Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan K3L tindakan dan standar yang dilakukan oleh PLN UID Jatim adalah membuat dan melakukan Standar Prosedur Operasional – SOP untuk setiap kegiatan, inspeksi manajemen, monitoring pekerjaan di lapangan yang diinfokan ke dalam whatsapp grup dan melalui website Inspekta.

Monitoring K3L dilakukan berkala, setiap bulan, tiga bulan atau enam bulan mengacu pada dokumen lingkungan unit yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat

2.7. Pelaksanaan Pelatihan, Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Mekanisme Penanganan Keluhan

Pelatihan OHS bagi karyawan PLN UID Jatim misalnya pelatihan bersertifikat untuk Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja Umum – AK3U, Ahli Keselamatan Kesehatan Kerja – AK3, Pemadam Kebakaran, Pelatihan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya – PLB3 dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara – PPPU. Kegiatan di Bulan Nasional K3 Januari – Februari biasanya difokuskan pada masyarakat umum, misalnya dengan melakukan sosialisasi tentang listrik aman, kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan, serta simulasi tanggap darurat.

Pelatihan dan kegiatan listrik dan bagi masyarakat umum dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan – CSR, dengan mendukung kegiatan pertanian, pariwisata, persampahan dan kerajinan rakyat.

Keluhan pelanggan PLN UID Jatim di 2023 biasanya terkait putusnya aliran listrik, yang diatasi dengan pembuatan dan penerapan SOP Feeder dan kesulitan mengakses pembelian listrik pra-bayar, yang diatasi dengan perbaikan listrik penjualan token listrik. Tidak ada keluhan berkaitan dengan aspek perlindungan lingkungan dan sosial.

2.8. Aspek Kunci untuk Peningkatan Pelayanan

Temuan yang perlu diperbaiki di 2023 adalah: 1) perbedaan antara material yang ada di gudang dengan data aplikasi AGO; 2) terjadi 1455 interfensi feeder; dan kesulitan mengakses pembelian listrik pra bayar dikarenakan terbatasnya akses pembelian token terutama di *remote areas*.

Bab 3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan: secara umum di lapangan proyek dilakukan dengan efektif menggunakan kelengkapan K3L dan sosial yang memadai; rencana dan pemantauan K3L dan sosial dengan UKL – UPL sesuai standar AIIB.

Rekomendasi: melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan K3L dengan menghindari kecelakaan di tempat kerja sesuai standar AIIB dan PLN; melanjutkan pemantauan sesuai ESMP dan UKL – UPL; melanjutkan komunikasi bermakna dan sistem penyampaian keluhan PLN; melakukan pengelolaan bahan, limbah dan gudang B3 sesuai standar; mengurangi pemutusan arus listrik dan keluhan pelanggan.

Guna peningkatan kualitas pada monitoring Gudang, PLN UID Jatim telah meningkatkan kedisiplinan dalam pengecekan material yang terdapat di gudang material dan aplikasi dengan membuat jadwal dan penanggungjawab. Selain itu, trafo yang terkontaminasi PCBs sudah ditempatkan di TPS limbah B3. UID Jatim juga telah memperluas jaringan dengan bekerja sama dengan beberapa minimarket lokal dengan tujuan pelanggan sudah tidak kesulitan dalam melakukan top-up token listrik. Pekerja UID Jatim juga berkomitmen untuk menyelesaikan gangguan secepat mungkin untuk menghindari terjadinya padam yang terlalu lama dan memberikan monitoring rutin bulanan kepada kantor induk UID Jatim dari UP3.

Chapter I

Introduction

1.1. Purpose of the Monitoring Report 2023

One of PLN UID Jatim's objectives is to mitigate or avoid adverse environmental and social impacts in AIB – PLN Strengthening Distribution Networks in East Java – Bali Project. The purpose of this Annual Environmental and Social Monitoring Report is to present the environmental and social mitigation and monitoring activities in East Java Province undertaken by PLN UID Jatim covering the project in 2023. This report includes updates on project progress and evaluation of environmental and social program implementation. The report is written by an environmental officer and supervised by Manager of Health and Safety Division and General Manager of PLN UID Jawa Timur.

1.2. Brief Project Description

PLN UID Jatim is a unit business below PT PLN (Persero) which is a state-owned company that is responsible for managing electricity in Indonesia, according to Government Regulation No. 18 Year 1972 that PLN is in charge of providing electric power to the public. PLN UID Jatim has been responsible for managing the electric power distribution system in East Java Province since 1961, with a working area of 47.963 km² and a population of 40,67 million people (BPS, 2020). PLN UID Jatim is providing electrical services for people in urban, rural areas, and remote islands, such as Kangean, Sapeken, and Sapudi Islands, to mention some.

In the operation of adequate and reliable electric power distribution in East Java Province, PLN UID Jatim organizationally consists of 16 UP3s, one UP2D, one UP2K, and 112 ULPs. The condition of PLN UID Jawa Timur electrical system until December 2023 shows that the power is capable of 9.552 MW, and the peak load was 5.939 MW and reserves was 3.032 MW. Currently, PLN UID Jatim has served more than 12 million customers, consisting of household, government, industry, and business customers. Strengthening the distribution networks continues to be carried out to serve the electricity needs of the entire community and economic development in East Java Province. The detailed location of UID, UP2D, UP2K, UP3, and ULP can be found in Appendix 1.



Figure 1. The Working Area of PLN UID Jatim

East Java and Bali Power Distribution Strengthening Project comprises the expansion of medium-voltage (MV) and low-voltage (LV) distribution network, including erection of new poles, cable stringing, trenching and cable burial in urban environment, and installation of distribution transformers, customer connection and meter replacement, MV switch of LBS and Rec, and MV

distribution cubicle and substation. The subprojects comprise the following activities taking place in defined study areas and for which AIIB funds are sought:

- a. Delivery to site and temporary storage at site of material, including transformers, distribution power lines, piles and other type of materials;
- b. Installation or upgrading of the distribution network, including clearing of the right of way; civil works like foundation digging for poles, and in some instances trenching and or boring; erection of poles; stringing of power lines; installation and replacement of transformers;
- c. Storage, handling, and disposal of end-of-life transformers;
- d. Connection to the network and to households (including installation of customer meter boxes and circuit breakers); and
- e. Maintenance of distribution lines like vegetation clearance.

Table 1 below is describing the components of the project.

Table 1. The Component of East Java and Bali Power Distribution Strengthening Project

No.	Distribution Network Type	Activities
1	Overhead line	Improvement and expansion of distribution network above ground level which requires (i) land use to install electrical poles no more than 0,2 m ² ; (ii) the possibility of removal non-ground access (especially trees) within 2,5 m of the conductor during the installation process, and existing road's line (ROW) with a width depending on line voltage and type of facility planned or located in the area belongs to the road.
2	Underground line	Being considerate if overhead line is not applicable (for example: in urban/commercial areas) Using horizontal directional drilling (HDD) for a road crossing to minimize the impact, and minimum drilling along the side of road from HDD exit point to a pole. The possibility of underground lines installation is low.
3	Distribution transformer	Installed on pole structure Distribution transformers are arranged into two categories: pad-mount and pole mount. Pad-mount transformers will be installed on public land, or in locations where customers need power at the primary distribution level, usually in a commercial centre or an industrial area.

1.3. Compliance with National Regulation

In running the business, PLN UID Jatim ensures compliance with all relevant regulatory requirements. PT PLN (Persero) is established with the Deed of Incorporation of Limited No. 169 dated 30 July 1994 and its amendment No. 9 dated 20 January 2015. The business activities, particularly in power distribution at PLN UID Jatim, are performed based on the following permits:

- a. Minister of ESDM Decree No. 634-12/20/600.3/2011 concerning PT PLN (Persero)'s Electricity Supply Business License (IUPTL) – for the electricity in Java and Bali areas, the electricity supply business permit as stated in Appendix 1;
- b. Minister of ESDM Decree No. 188.K/HK.02/MEM.L/2021 concerning PT PLN (Persero)'s Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030 – for the distribution development plan in Java, Madura, and Bali areas as stated in Appendix 1.

In Indonesia, the Act No. 32 Year 2009 with amendments to the Act No. 11 Year 2020 is the main environmental law covering important environmental issues, including environmental standards, type of environmental documents, environmental permits, and environmental audits.

According to Government Regulation No. 22 Year 2021 regarding Environmental Protection and Management, every business that has significant and insignificant impacts on the environment must have an Environment Approval, namely:

- Statement of Environmental Management and Monitoring Capability for low-risk businesses that have the least environmental effects;
- Environmental Management Efforts (UKL) and Environmental Monitoring Efforts (UPL) for medium-risk businesses, which was constructed with medium to low environmental impacts; and
- Environmental Impact Assessment (AMDAL) for a high-risk business, which was built in a conservation ecosystem, leading to harming environmental.

In 2023 in UID Jatim, there is no expired or renewed permit or certificate, all have been in accordance with national regulation. The regulations stated in the document were the latest rules of Indonesian government.

1.3.1 UKL UPL Documents for Warehouse and Project Activities

In doing electric power distribution activities, PLN UID Jatim has the Environment Permit No. 17.0/3/02/V/2020 regarding Environmental Management Document (DPLH) of 20 kV Electricity Network for East Java Distribution Area. In addition, PLN UID Jatim's sub-units like UP2D and UP3s, sub-sub units named ULPs, and other support activities such as hazardous waste temporary storage also already have environmental documents. List of environmental approvals and permits in PLN UID Jatim is tabulated in Appendix 2. Following this approval, PLN UID Jatim is required to submit a report about the environmental and social commitments specified within the environmental documents to the Environmental Agency of each respective regencies every six months. In 2023 UID Jatim has submitted punctual environmental reports to the regional environmental agencies on June and December 2023.

1.3.2 Hazardous Waste Storage Permit

The types of hazardous waste generated from power distribution activities are used lubricating oil, battery and used battery, and used rags. These wastes are stored at hazardous waste temporary storages in several areas in East Java Province, with operating permit for each hazardous waste temporary disposal site (TPS) seen in Appendix 3 and condition of the hazardous waste temporary storages can be seen in Figure 8.

1.4. Environmental and Social Management Plan (ESMP)

The ESMP of PLN UID Jatim has encompassed the entire project stages and the mitigation systems, starting from planning or pre-construction to operational phase.

a. Preconstruction Phase

The preconstruction phase is the time to determine the location and capacity of the project and make plans to mitigate risks during construction work. Preconstruction activities include the calculation and simulation to optimize the configuration of the electric power distribution network, a field survey to meet the construction standards and environmental requirements, public consultation and communication with stakeholders and the general public on the scope, and possible impacts and proposed mitigation measures.

b. Construction Phase

Construction activities that carried out in this project, including new connections for both medium and low voltage power line, distribution substation, cubicle, kWh meter; and constructed improvements due to fallen trees, tornadoes, and others. The implementation of construction activities is in accordance with the standard operational procedures that have been set, including the Indonesian National Standard, PLN Standard, and PLN UID Jatim's Internal Working Procedure. At the end of the construction phase, a commissioning test is to be performed to ensure that they are safe and meet the design requirements.

The projected impacts and risks during the construction phase are expected to be limited in scope but may include:

- Disturbance to traffic: The proposed interventions may involve temporary road closures and vehicle or pedestrian traffic deviations that could result in traffic congestion and perhaps risks of accidents.
- Temporary difficulties of access: during construction and installation of equipment, access may be limited to the adjacent buildings, and some disturbance to the neighbouring residents and users.
- Noise generation: The use of construction equipment could potentially impact workers and neighbourhood residents.
- Construction safety: Construction site activities, particularly work at height and/or live-line working, must be effectively managed to prevent injury to workers and disruption of the project.

c. Operational Phase

The purpose of this construction activity is to support the distribution of electricity so it can be accepted by customers without interruption. Thus, in the operational phase, routine monitoring and maintenance were carried out in accordance with applicable regulations and standards. The maintenance work can be performed either planned or unplanned by competent personnel. PLN UID Jatim has a team that is compatible to maintain the electrical equipment in live-line working or hotline maintenance of PDKB – Live-line Working Team. Maintenance activities are also carried out by implementing occupational health and safety (OHS).

Environmental management in the operational phase is carried out by measuring the conditions of the work environment and environmental management based on ESMP matrix in the environmental document to ensure that environmental pollution does not occur. The social management activities are carried out by involving stakeholders like local communities, for example public consultation and socialization activities for safe electricity use and community development. The ESMP matrix is tabulated in Appendix 4.

Chapter II

Results

Numerous projects of PLN UID Jatim have been conducted in 2023 to enhance the JTM reliability and achieve the efficiency: new feeder construction for new GI operations, old materials displacement, old transformers replacement, key-point replacement and installation of LBS, recloser, DS, JTM, JTR, Substation construction, APP installation, and substitution of 1 phase and 3 phase meter boxes.

The institutional arrangement and staffing for Environmental and Social management and supervision in PLN UID Jatim in general and applied in the project is under the UID General Manager, Agus Kuswardoyo, with daily monitoring and implementation under the Safety, Security, Occupational Health and Environment Manager, Parlan. For the Implementation Units of UP2 and UP3 the supervision is under the UP Managers, and daily implementation under the Safety, Security, Occupational Health and Environment Team Leaders.

2.1. Environmental and Social Screening Checklist

At the beginning of subprojects, an environmental and social screening checklist is used to review potential environmental and social safeguard impacts and determine whether the subprojects will trigger relevant safeguard policies of AIIB. In the location selection process for the subprojects, PLN UID Jatim carried out the environmental and social screening including protected area, safe distance, main biodiversity area, indigenous peoples, cultural heritage, and the use of private land. The PLN UID Jatim's project capacity of power distribution strengthening in 2023 is tabulated in Table 2 below.

Table 2. The PLN UID Jatim's Project Capacity of Power Distribution Strengthening in 2023

No	Unit	Activity	Location (City/District)	Details
1	UP3 Surabaya Selatan	Network Reliability Improvement	- Surabaya City, - Gresik Dist., - Sidoarjo Dist.	JTM: 85.39 kms JTR: 151.85 kms Substation: 531 set
2	UP3 Surabaya Utara	Network Reliability Improvement	- Surabaya City	JTM: 39.79 kms JTR: 81.13 kms Substation: 241 set
3	UP3 Malang	Network Reliability Improvement	- Malang Dist., - Batu City, - Malang City	JTM: 276.67 kms JTR: 611.12 kms Substation: 1012 set
4	UP3 Pasuruan	Network Reliability Improvement	- Pasuruan City, - Probolinggo City, - Pasuruan Dist., - Probolinggo Dist.	JTM: 216.73 kms JTR: 372.86 kms Substation: 778 set
5	UP3 Kediri	Network Reliability Improvement	- Blitar City, - Kediri City, - Blitar Dist., - Kediri Dist., - Tulungagung Dist.	JTM: 610.15 kms JTR: 606.81 kms Substation: 2702 set
6	UP3 Mojokerto	Network Reliability Improvement	- Mojokerto City, - Jombang Dist., - Mojokerto Dist., - Nganjuk Dist.,	JTM: 463.66 kms JTR: 425.77 kms Substation: 909 set

Table 2. The PLN UID Jatim's Project Capacity of Power Distribution Strengthening in 2023

No	Unit	Activity	Location (City/District)	Details
7	UP3 Madiun	Network Reliability Improvement	- Madiun City, - Madiun Dist., - Magetan Dist., - Ngawi Dist.	JTM: 287.88 kms JTR: 655.40 kms Substation: 542 set
8	UP3 Jember	Network Reliability Improvement	- Jember Dist., - Lumajang Dist.	JTM: 312.91 kms JTR: 568.24 kms Substation: 722 set
9	UP3 Bojonegoro	Network Reliability Improvement	- Bojonegoro Dist., - Lamongan Dist., - Tuban Dist.	JTM: 241.62 kms JTR: 438.90 kms Substation: 611 set
10	UP3 Banyuwangi	Network Reliability Improvement	- Banyuwangi Dist.	JTM: 138.82 kms JTR: 440.27 kms Substation: 457 set
11	UP3 Pamekasan	Network Reliability Improvement	- Bangkalan Dist., - Pamekasan Dist., - Sampang Dist., - Sumenep Dist.	JTM: 1,028.29 kms JTR: 820.92 kms Substation: 935 set
12	UP3 Situbondo	Network Reliability Improvement	- Bondowoso Dist., - Situbondo Dist. -	JTM: 297.70 set JTR: 465.23 set Substation: 259 set
13	UP3 Gresik	Network Reliability Improvement	- Surabaya City - Gresik Dist., - Lamongan Dist.	JTM: 83.98 kms JTR: 137.46 kms Substation: 308 set
14	UP3 Sidoarjo	Network Reliability Improvement	- Gresik Dist., - Mojokerto Dist., - Sidoarjo Dist.	JTM: 161.19 kms JTR: 342.19 kms Substation: 567 set
15	UP3 Surabaya Barat	Network Reliability Improvement	- Surabaya City, - Gresik Dist., - Sidoarjo Dist.	JTM: 58.72 kms JTR: 223.52 kms Substation: 422 set
16	UP3 Ponorogo	Network Reliability Improvement	- Pacitan - Ponorogo - Trenggalek	JTM: 51.85 kms JTR: 263.68 kms Substation: 946 set

2.2. Monitoring the Pre-Construction Period

Constructing medium or low voltage network of JTM and JTR might affect in ecological, physical, and social aspects at pre-construction stage. In PLN UID Jatim, many of JTM and JTR construction have been conducted for mostly residents and industries. Before start any projects, the UP3, a sub unit of PLN, analyse the potential effects to environment, land, residents, indigenous people, and cultural heritage through screening form, seen in Appendix 7. The trees cutting and trimming under Right of Way (ROW) must be performed to ensure the networks reliability with the permission of landowners in agreement documents. The Figure 2 below shows the safety distance and ROW in this project and Figure 3 depicts the written agreement by the land owner for PLN to place distribution network on his/her land.



Figure 2. RoW dan Safe Distance on Distribution Power Lines

SURAT IZIN PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK

Kepada Yth,
PT. PLN (Persero) Rayon Babat

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SRIYANTO
Alamat : Pendikan RT3 RW 04
Bukti / KTP : 352405284580001
Untuk Pelanggan : Perluasan Jaringan PLN wilayah Sogo selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan telah memberikan **PERSETUJUAN** kepada PT. PLN (Persero) Rayon Babat untuk melakukan kegiatan pemasangan jaringan listrik di lahan / depan lahan pribadi milik (Saya / Keluarga). Dan jika dikemudian hari terjadi masalah perihal surat persetujuan dan pemasangan jaringan listrik ini, saya tidak akan menuntut dan tidak akan membebankan kerugian kepada PT. PLN (Persero) Rayon Babat.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Dibuat di,

Pada tanggal,

Materai
SRIYANTO
METERAI TEMPEL
678AJX250619743

Figure 3. Written Agreement

2.3. Monitoring the Construction Period

During construction activities, the third parties responsible on doing the construction, must meet all the requirements of PLN standard and government regulation such as CSMS certified contractor, HIRARC, working permit, and standard operational procedures implementation, filled in contract document between PLN UID Jatim and vendors. For instance, installation and demolition of JTM,

substation cubicle, JTR, SR APP 3 phase at UP3 Pasuruan. According to contract document No: 0061.SPK/DAN.01.03/F04000000/2023, the vendor has complied the requirements and assured the projects have been worked properly. The third parties who work in PLN must meet contractor safety management systems (CSMS) requirements. Figure 4 below shows the use of attention board as a work sign to increasing the community awareness, while Figure 5 and 6 are to show vendors' commitment in HSE and CSMS Certificate respectively.



Figure 4. Warning Attention Board

2.3. Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Kerja K3) & Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

- a) Penerima Perintah dan seluruh tenaga kerjanya wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Kerja (K3) & Keselamatan Ketenagalistrikan (K2);
- b) Penerima Perintah wajib memiliki dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan dan menjamin keamanan bagi para pekerjaanya;
- c) Penerima Perintah dan semua tenaga kerjanya wajib menggunakan peralatan kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d) Penerima Perintah wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang berkompetensi di bidang pekerjaannya;
- e) Apabila perjanjian ini termasuk pada pekerjaan beresiko tinggi, Penyedia Jasa/Vendor wajib menggunakan sistem Lock Out Tag Out (LOTO);
- f) Penerima Perintah bertanggung jawab menjaga keselamatan pekerjaanya. Apabila pekerja Penerima Perintah mengalami kecelakaan dalam pekerjaan ini, maka hal itu merupakan tanggung jawab Penerima Perintah dan Penerima Perintah wajib melaporkan ke instansi setempat yang terkait/berwenang dengan menyampaikan tembusannya kepada Pemberi

Figure 5. Vendor's HSE Commitment



Figure 6. CSMS certificate

2.4. Monitoring the Operation Period

Workers and society are the most affected parties during the operational stage. On the other side, waste is an affecting resource appears in this phase. For instance, for an old transformers replacement, its transportation to a warehouse should be assured no oil spills from the transformer, and the warehouse must be covered as protection from rain. According to Government Regulation No. 22 of 2021, warehouse must be covered to protect from the rain and provided an oil trap to prevent environmental pollution regarding to oil spills or leakage. Figure 7 below shows an example of the warehouse condition in UID Jatim.



Figure 7. UID Jatim Transformer Warehouse Condition

2.5. Warehouse Monitoring Results

Materials warehouse is distinguished with waste warehouse, in particular hazardous waste. Each unit of PLN UID Jatim has own materials warehouse. The materials such as meter circuit breaker (MCB), cables, and other equipment are organized into groups based on the type, certain physical or mechanical properties. In practice some discrepancy was found between the physics material total in the warehouse and data in the application when Integrated Management System (IMS) audit performed. To improve the monitoring and avoid the difference, the warehouse monitoring system has been improved

by responsible officers through regular monitoring using the Online Warehouse Application (AGO – *Aplikasi Gudang Online*) and organising the warehouses orderly with detail as in Page 90.

The hazardous waste temporary disposal site is used for hazardous waste generated from power distribution activities such as used lubricating oil, battery, used battery, and used rags. Hazardous waste management is carried out with a third party owned a hazardous waste management permit from the Minister of Environment and Forestry. Before the waste were given to the third party to be managed, it is stored at hazardous waste temporary storages in several areas in East Java Province, with the operating permit for each hazardous waste temporary disposal site. In 2023, PLN UID Jatim has developed environmental procedures for handling spilled oil, storage and treatment hazardous and chemical materials that integrated with Integrated Management System (IMS) of PLN UID Jatim. The condition of the hazardous waste temporary storages in the PLN UID Jatim are illustrated in the figures below.



Figure 8. Hazardous Waste Storage at UP3 Pasuruan

As noted, a type of hazardous waste generated is used transformer oil. Based on the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.29/MENLHK/SETJEM/PLB.3/12/2020, PCBs are prohibited from being used and it is still found in transformer oil. PLN UID Jatim has managed the PCBs by taking an inventory of offline and online transformers, visual testing based on the year of manufacture and transformer capacity, and conducting tests on transformers that may indicate contained PCBs. The criteria for transformers that have potential to contain PCBs are transformers with years of manufacture before 1997 and the capacity more than 100 kVA.

The PCBs testing was done in stages. In 2023, 135 samples of offline transformers have been tested using a wipe test method. The results depicted that no offline transformers were found to be contaminated by PCBs. The results of PCBs testing using the swiipe test method can be seen in Appendix 6 and the PCBs test activity as in Figure 9.



Figure 9. Transformer Offline Oil Sampling for PCBs Test

PLN UID Jatim has 18 hazardous waste temporary disposal sites. The company has endeavoured to provide proper storages based on Indonesian Government Regulation No. 22 of 2021. According to the data of PLN Headquarter, each disposal sites has been supplemented with roof covering, concrete floor,

drainage systems connected to fat, oil trap, eyewash, first aid, fire extinguisher, the hazardous waste separation based on each category, housekeeping and transformation labelling. The condition of hazardous storage facilities can be seen in Figure 10, which have been constructed in compliance with the regulations set forth by the Ministry of Environment and Forestry and have been granted official authorization. Nevertheless, several storages might require minor refinement in the following year owing to the age of warehouses and natural condition, like wind storming and sun exposure that causing rust stain roof.



Figure 10. Hazardous Waste Storage

2.6. Health and Safety Monitoring

The majority of activities at PLN UID Jatim have high risk level that may cause accident to workforce such as serious injuries, disability and death or fatality, allowing the health and safety aspects must be considered as first priority in every work stage. Near miss is any event that does not lead to harm but might potentially cause illness or injury. Unsafe action is any actions or behaviours that put the workers at risk of harm, whilst unsafe condition is a condition where likely cause property damage or injury to the employees. Preventing the accidents, PLN Headquarter has rolled out an application called INSPEKTA to monitor several findings of health and safety aspects nonconformity for near miss, unsafe actions and unsafe conditions, including PLN's employees and third parties, such as contractors. Each employee is given an account for reporting perilous incidents surrounding the work environment. The PLN Headquarter monitors the reports for delivering the solution.

Throughout 2023 the number of unsafe conditions at PLN UID Jatim were slightly over 95%, hitting 21,266 of 21,985 cases, 0.03% unsafe actions and a few near miss incidents like poor lighting resulting in a possible employee tripping, and almost falling over an undetected extension cord; however, there was no fatality was occurred in the given year as in Figure 11 below. Given the numerous reports of working in unsafe conditions, UID Jatim is taking action to improve safety management by implementing and supervising the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for each activity, including Network Maintenance and Low and Medium Voltage Substations by management; and field monitoring with report using INSPEKTA website. Investigating whether the reports have been improved, the employees could be seen those via the INSPEKTA provided in Figure 12. Therefore, to maintain the curtailment of risks or accidents occur in the workplace, the third parties must comply standard regulation before working, such as filling working permit, having contractor safety management

system (CSMS) certificate (Fig. 6), and wearing personal protective equipment as written in the contract documents.

 Bernaded Oka Anggaran Inspector 8 Poin Unit Induk Distribusi Jawa Timur Input Temuan Baru Monitoring Progress Infografis Maturity Level Safety Calendar Working Permit Pengaturan						
Statistik Unit dari Kategori						
Direktorat Distribusi Unit Induk Distribusi -- Unit Pelaksana -- -- Subunit Pelaksana -- 2023-01-01 2023-12-31						
#	Unit	Unsafe Act	Unsafe Condition	Nearmiss	Accident	
	Unit Induk Distribusi Jawa Timur	6	9	1	0	
1	UP2D JATIM	0	57	1	0	
2	UP3 Banyuwangi	135	1.564	0	0	
3	UP3 Bojonegoro	4	604	0	0	
4	UP3 Gresik	6	464	0	0	
5	UP3 Jember	17	1.590	3	0	
6	UP3 Kediri	16	2.333	8	0	
7	UP3 Madiun	7	2.857	0	0	
8	UP3 Malang	287	1.939	0	0	
9	UP3 Mojokerto	56	3.117	0	0	
10	UP3 Pamekasan	7	1.223	1	0	
11	UP3 Pasuruan	18	631	1	0	
12	UP3 Ponorogo	7	1.107	0	0	
13	UP3 Sidoarjo	0	242	0	0	
14	UP3 Situbondo	132	2.372	0	0	
15	UP3 Surabaya Barat	4	197	0	0	
16	UP3 Surabaya Selatan	0	249	0	0	
17	UP3 Surabaya Utara	2	711	0	0	
Total		704	21.266	15	0	

Figure 11. INSPEKTA Monitoring Report

Unit	Open	Progress	Closed	RKAP	Rejected	Total (F/U * Faktor Kali)	Total Approved * 3	Effort Factor
UP2D JATIM	4	0	52	1	2	159	171	92.98 %
UP3 Banyuwangi	0	0	1711	0	1	5133	5133	100 %
UP3 Bojonegoro	0	0	608	0	0	1824	1824	100 %
UP3 Gresik	2	1	431	34	1	1397	1404	99.5 %
UP3 Jember	0	0	1615	0	0	4845	4845	100 %
UP3 Kediri	15	1	2340	0	1	7022	7068	99.35 %
UP3 Madiun	13	77	2773	0	1	8473	8589	98.65 %
UP3 Malang	10	4	2212	0	0	6644	6678	99.49 %
UP3 Mojokerto	2	0	3160	0	17	9480	9486	99.94 %
UP3 Pamekasan	6	0	1211	0	14	3633	3651	99.51 %
UP3 Pasuruan	7	0	642	0	0	1926	1947	98.92 %
UP3 Ponorogo	0	0	1112	2	0	3342	3342	100 %
UP3 Sidoarjo	20	0	222	0	0	666	726	91.74 %
UP3 Situbondo	6	0	2476	23	0	7497	7515	99.76 %
UP3 Surabaya Barat	0	0	198	3	0	603	603	100 %
UP3 Surabaya Selatan	7	0	241	1	0	726	747	97.19 %
UP3 Surabaya Utara	6	0	709	0	0	2127	2145	99.16 %
Unit Induk Distribusi Jawa Timur	4	0	13	0	0	39	51	76.47 %

Figure 12. Improvement of INSPEKTA Monitoring Report

2.7. Training, Stakeholders Engagement and Grievance Redress Mechanism (GRM) Implementation

In PLN UID Jatim regular training and certification in Occupational Health and Safety – OHS aspects are General Occupational Safety and Health – AK3U, Electrical Occupational Safety and Health – AK3L, Fire Fighter, and Toxic and Hazardous Waste – PLB3, with participants from HSE Unit and general, defined by the Human Resources Development Unit following schedule from the HSE. PLN UID Jatim activities during National OHS Month in January – February usually is focused to the community by having socialisation on general health, medical check-up and blood transfusion, and emergency response simulations. Figure 13 and 14 illustrate the result of medical check-up and emergency response simulations in handling impromptu floods in East Java, respectively.

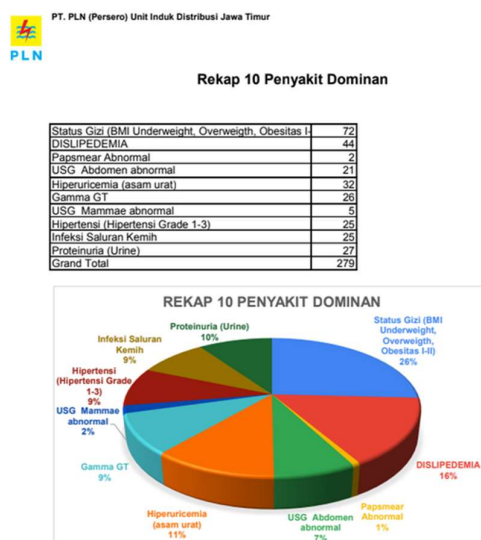


Figure 13. The top-ten major diseases within PLN employees



Figure 14. Emergency response simulations

Training for the surrounding community in UID Jatim is applied by the Corporate Social Responsibility (CSR) program. PLN UID Jatim has sponsored many CSR program like Farmers – Tani Betet Tour, Tani Listrik Terpadu Educated Tour, Ikat Tenun Village, Sendi Village, Waste Bank, and Petik Naga Listrik, as seen in Figure 15. At the end of the year, UID Jatim raised the Ikat Tenun Village, which is located in the Dayu Village, Blitar, by harnessing the potential of local communities who worked as immigrant labourers and disabled individuals with 27 of total workers. More importantly, the community has grown a profit by approximately 4 million rupiahs at 66 million rupiahs compared to one in 2022.



Figure 15. CSR Programs at PLN UID Jatim



The electricity construction may have a negative effect to human health due to the electromagnetic radiation. In case of cable uncovered insulations, people live near the pole might get an electric shock. Some customers in PLN UID Jatim had met problems with topping up the prepaid electricity tokens for kWh meter and some issued the power outage. During 2023, it has been recorded 1,080 times feeder interferences, as in the Figure 16 below. To overcome the issues, PLN UID Jatim has developed and implemented standard operational procedure (SOP) for addressing first-hand interferences problems, which were monitored and reported monthly to PLN UID Jatim by sub units. PLN workers attempted to alleviate the issues in a short time, preventing long black out timing and safeguarding electricity resilience to customers. In 2023, there were no grievance related to social and environmental aspect in PLN UID Jatim.

GGN PENYULANG (kali)		
NO	A R E A	REALISASI
		2023
1	SURABAYA SELATAN	146
2	SURABAYA UTARA	89
3	MALANG	51
4	PASURUAN	105
5	KEDIRI	101
6	MOJOKERTO	66
7	MADIUN	39
8	JEMBER	41
9	BOJONEGORO	111
10	BANYUWANGI	37
11	PAMEKASAN	59
12	SITUBONDO	37
13	GRESIK	40
14	SIDOARJO	77
15	SURABAYA BARAT	37
16	PONOROGO	44
J U M L A H		1.080

Figure 16. The Total of Interferences in 2023

PLN UID Jatim has facilitated customers to express faced-issues via call centre 123 and PLN Mobile, and get information about programmes in PLN by social media like Instagram, Facebook, and local radios, as shown in Figure 17 below.



Figure 17. PLN Mobile Application and Instagram

2.8. Summary of Key Findings

During 2023 the Key Findings in PLN UID Jatim were:

- Feeder interferences occurred 1,080 times
- Difficulty in topping up electricity for prepaid kWh machine due to geographical location.
- 21.985 incidents of total INSPEKTA findings, including unsafe actions, unsafe conditions and near miss occurred.

Chapter III

Conclusion and Recommendation

This ESMP Monitoring Report presents the status of environmental monitoring and mitigation measures undertaken by PLN UID Jatim. The conclusion drawn from this ESMP Monitoring Report were:

- The project is generally being effectively implemented on sites with appropriate resources and capability to accomplish the plan;
- The periodic environmental monitoring and management during the operation phase, as required by the UKL-UPL, has been conducted frequently and with no major deficiencies to the applicable regulation and AIB safeguard standards;
- The project is considered to comply with most of the commitments stated in the UKL-UPL and HSE requirements with findings regarding the condition of transformers warehouses in several units of PLN UID Jatim. Though there have been zero work accidents, the potential for harm remains high refer to data from INSPEKTA.

The recommendation for improving the environmental, social, health, and safety performance within the reporting period is as follows:

- Elevating HSE performance, the unit monitors all the work activities both in the sites and office by conducting management inspection and safety briefing, fulfilling working permit, wearing standard PPE, putting up warning/attention signs, and having CSMS certificate;
- To continue the frequency of monitoring as required in the UKP-UPL;
- To continue meaningful communication and consultation with the community and application of the PLN's established Grievance Redress Mechanism;
- To maintain the hazardous waste management and assure the hazardous waste temporary storage complied with the technical standards;
- To minimize network interferences and customer's complaints.

Appendix 1: UID Jatim's Detailed Business Location

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
1	UID Jawa Timur	Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Kota Surabaya Coordinate: -7.265454263357005, 112.74332761476165.
2	UP2D Jawa Timur	Jl. Embong Wungu No. 4, Kota Surabaya Coordinate: -7.26534840972209, 112.74320004245534
2.1	Central Distribution Control Center (DCC Tengah)	Jl. Embong Wungu No. 4, Kota Surabaya Coordinate: -7.26534840972209, 112.74320004245534
2.2	West Distribution Control Center (DCC Barat)	Sambijajar, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk Coordinate: -7.614819900635506, 112.0980971305032.
2.3	East Distribution Control Center (DCC Timur)	Plerenan, Sumberkedawung, Leces, Probolinggo Coordinate: -7.848135894642564, 113.22891162925504
3	UP2K Jawa Timur	Jl. Embong Trengguli No. 19-21, Kota Surabaya Coordinate: -7.265454263357005, 112.74332761476165.
4	UP3 Banyuwangi	Jl. Nusantara No. 1, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Coordinate: -8.209737555785193, 114.37792552837466
4.1	ULP Banyuwangi Kota	Jl. Nusantara No. 1, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Coordinate: -8.209737555785193, 114.37792552837466
4.2	ULP Rogojampi	Jl. Nusantara No. 1, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi Coordinate: -8.209737555785193, 114.37792552837466
4.3	ULP Genteng	Jl. Diponegoro No. 345, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi Coordinate: -8.371472824225346, 114.1461648517396
4.4	ULP Muncar	Jl. Brawijaya No. 60, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Coordinate: -8.435433993786555, 114.32356888516476
4.5	ULP Jajag	Jl. Ahmad Yani No. 47, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Coordinate: -8.442458210599677, 114.18045157182357
5	UP3 Bojonegoro	Jl. Teuku Umar No. 3, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro Coordinate: -7.152787529513715, 111.89108325409164
5.1	ULP Babat	Jl. Raya Pantura No. 151, Kec. Babat, Kab. Lamongan Coordinate: -7.1001196050351405, 112.19220438349588
5.2	ULP Bojonegoro	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro Coordinate: -7.150819736457851, 111.87902104112098
5.3	ULP Brondong	Jl. Raya Paciran, Km. 35, Kec. Paciran, Kab. Lamongan Coordinate: -6.868077634887189, 112.332823332428
5.4	ULP Jatirogo	Jl. Panglima Sudirman, Desa Sadang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban Coordinate: -6.883050864885932, 111.65975543222176
5.5	ULP Lamongan	Jl. Veteran, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan Coordinate: -7.103517296921866, 112.4237178453836
5.6	ULP Padangan	Jl. Bojonegoro-Ngawi, Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro Coordinate: -7.166103463800881, 111.61065024093234
5.7	ULP Sumber Rejo	Jl. Imam Bonjol No. 3, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro Coordinate: -7.17062743726624, 112.02663197235925
5.8	ULP Tuban	Jl. AKBP Suroko No. 38, Kebonsari, Kec. Tuban, Kab. Tuban Coordinate: -6.902854288535241, 112.06199932947025
6	UP3 Gresik	Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 134, Kec. Gresik, Kab. Gresik Coordinate: -7.162665067494151, 112.63250181458187
6.1	ULP Bawean	Jl. Pendidikan, Kec. Sangkapura, Kab. Gresik

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
		Coordinate: -5.84856624754764, 112.66068972757812
6.2	ULP Benjeng	Jl. Raya Munggugianti No. 414, Kec. Benjeng, Kab. Gresik Coordinate: -7.263472579117247, 112.49512920343646
6.3	ULP Giri	Jl. Raden Santri No. 29, Kec. Gresik, Kab. Gresik Coordinate: -7.154313198786633, 112.6563626944322
6.4	ULP Sedayu	Jl. Raya Pahlawan No. 26, Kec. Sidayu, Kab. Gresik Coordinate: -6.998295366697616, 112.56458210077783
7	UP3 Jember	Jl. Gajah Mada No. 198, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Coordinate: -8.177207742793087, 113.67795546431344
7.1	ULP Ambulu	Jl. Manggar, Kec. Tegalsari, Kab. Jember Coordinate: -8.344344482511081, 113.59727725647673
7.2	ULP Jember Kota	Jl. PB Sudirman No. 114, Kec. Patrang, Kab. Jember Coordinate: -8.142771503204608, 113.71229068979159
7.3	ULP Kalisat	Jl. DR. Wahidin No. 20, Kec. Kalisat, Kab. Jember Coordinate: -8.141329213414986, 113.81742034392617
7.4	ULP Kencong	Jl. R.A. Kartini No. 219, Kec. Kencong, Kab. Jember Coordinate: -8.291885803695745, 113.39251894575689
7.5	ULP Klakah	Jl. Raya Klakah, Kec. Klakah, Kab. Lumajang Coordinate: -7.999309423767122, 113.24939285658911
7.6	ULP Lumajang	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 177, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Coordinate: -8.100833551008531, 113.23191384362772
7.7	ULP Rambipuji	Jl. Dharmawangsa No. 42, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Coordinate: -8.207377193324266, 113.60885269962532
7.8	ULP Tanggul	Jl. Raya Lumajang-Jember, Kec. Tanggul, Kab. Jember Coordinate: -8.156517701456611, 113.44070657415432
7.9	ULP Tempeh	Jl. Raya Tempeh, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang Coordinate: -8.210746284237374, 113.17061359412766
8	UP3 Kediri	Jl. Basuki Rahmat No. 1, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri Coordinate: -7.813349361633385, 112.01428410981475
8.1	ULP Blitar	Jl. Ahmad Yani No. 21, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar Coordinate: -8.09830095225866, 112.17152498152501
8.2	ULP Campurdarat	Jl. Kanigoro No. 7, Kec. Campur Darat, Kab. Tulungagung Coordinate: -8.16205526178975, 111.85835924954077
8.3	ULP Grogol	Jl. Raya Gringging, Kec. Grogol, Kab. Kediri Coordinate: -7.745965862609262, 111.96759495672836
8.4	ULP Kediri Kota	Jl. Basuki Rahmat No. 1, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri Coordinate: -7.813349361633385, 112.01428410981475
8.5	ULP Ngadiluwih	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 98, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri Coordinate: -7.877881958721953, 111.99927051952601
8.6	ULP Ngunut	Jl. Raya Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung Coordinate: -8.094780954570098, 111.99609268484717
8.7	ULP Pare	Jl. Pb. Sudirman No. 25, Kec. Pare, Kab. Kediri Coordinate: -7.766605119403202, 112.19161482759446
8.8	ULP Srengat	Dandong, Kec. Srengat, Kab. Blitar Coordinate: -8.064783323745175, 112.07595950322442
8.9	ULP Sutojayan	Jl. Raya Utara Lodoyo, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar Coordinate: -8.160677685063103, 112.21745167745904
8.10	ULP Tulungagung	Jl. Kapten Kasihin No. 55, Kec. Tulungagung, Kab. Tulungagung

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
		Coordinate: -8.045498958925327, 111.90019677264871
8.11	ULP Wlingi	Jl. Panglima Sudirman No. 2, Kec. Wlingi, Kab. Blitar Coordinate: -8.084299099298404, 112.31246578527994
9	UP3 Madiun	Jl. MT Haryono No. 30, Kec. Taman, Kota Madiun Coordinate: -7.634100661917686, 111.53292954451179
9.1	ULP Caruban	Jl. Raya Caruban, Kec. Wonoasri, Kab. Madiun Coordinate: -7.549113371948408, 111.63826625659378
9.2	ULP Dolopo	Jl. Raya Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun Coordinate: -7.747105415341901, 111.52845006394058
9.3	ULP Madiun Kota	Jl. MT Haryono No. 30, Kec. Taman, Kota Madiun Coordinate: -7.634100661917686, 111.53292954451179
9.4	ULP Magetan	Dusun Magetan, Kec. Magetan, Kab. Magetan Coordinate: -7.6552068498082795, 111.32861257417176
9.5	ULP Mantingan	Jl. Raya Mantingan No. 44, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi Coordinate: -7.3647666630455975, 111.15475017220473
9.6	ULP Maospati	Jl. Raya Maospati Solo No. 51, Kec. Maospati, Kab. Magetan Coordinate: -7.606512910522695, 111.45209381466968
9.7	ULP Ngawi	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 37, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi Coordinate: -7.400581676389934, 111.44675988375208
10	UP3 Malang	Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.100, Kec. Klojen, Kota Malang Coordinate: -7.97442703617857, 112.63023906108599
10.1	ULP Batu	Jl. Trunojoyo, Songgokerto, Kec. Batu, Kota Batu Coordinate: -7.865585158352954, 112.50941695659945
10.2	ULP Blimbing	Jl. Raya Mangliawan No. 3 RT.04 RW.III, Kel. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang Coordinate: -7.950651702598757, 112.66810051456167
10.3	ULP Bululawang	Jl. Raya Bululawang No. 13, Kec. Bululawang, Kab. Malang Coordinate: -8.068763779167679, 112.64145566715918
10.4	ULP Dampit	Jl. Gunung Jati No.11, Kec. Dampit, Kab. Malang Coordinate: -8.21365159343354, 112.75585128530828
10.5	ULP Dinoyo	Jl. MT. Haryono, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Coordinate: -7.945936511450879, 112.61493362583593
10.6	ULP Gondanglegi	Jl. Pangeran Diponegoro No. 16, Gondanglegi, Kab. Malang Coordinate: -8.09877197287004, 112.63715842979494
10.7	ULP Kebon Agung	Jl. Satsui Tubun No. 28, Kec. Sukun, Kota Malang Coordinate: -8.02006251422973, 112.62995934613713
10.8	ULP Kepanjen	Jl. Panji No. 1, Kec. Kepanjen, Kab. Malang Coordinate: -8.133630353162488, 112.5750386579352
10.9	ULP Malang Kota	Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.100, Kec. Klojen, Kota Malang Coordinate: -7.974536357943166, 112.63006150485302
10.11	ULP Lawang	Jl. Pungkur Argo No. 12, Kec. Lawang, Kab. Malang Coordinate: -7.835663586523679, 112.69534985649997
10.12	ULP Singosari	Jl. Kertanegara, Kec. Singosari, Kab. Malang Coordinate: -7.889262592687962, 112.66748286295038
10.13	ULP Sumberpucung	Jl. Raya Karangates-Kepanjen, Kec. Sumberpucung, Kab. Malang Coordinate: -8.159836557246502, 112.45626140679877
10.14	ULP Tumpang	Jl. Raya Tulus Ayu No.15, Kec. Tumpang, Kab. Malang

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
		Coordinate: -8.018908812528908, 112.76379056263207
11	UP3 Mojokerto	Jl. R.A Basuni No. 69, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto Coordinate: -7.494232557836998, 112.42540026807116
11.1	ULP Jombang	Jl. KH. Wachid Hasyim No. 73, Kec. Jombang, Kab. Jombang Coordinate: -7.54464243104677, 112.23731199435669
11.2	ULP Kertosono	Jl. P.B. Sudirman 18, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Coordinate: -7.600452572164896, 112.10122420013502
11.3	ULP Mojoagung	Jl. Raya Veteran No. 347 Miagan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang Coordinate: -7.56799553938388, 112.3575532123227
11.4	ULP Mojokerto	Jl. Jend. A. Yani No.6, Kec. Magersari, Kab. Mojokerto Coordinate: -7.463760306857156, 112.4350395798463
11.5	ULP Mojosari	Jl. Pemuda No. 78, Kota Mojosari, Kab. Mojokerto Coordinate: -7.508646520426993, 112.56021825121272
11.6	ULP Nganjuk	Jl. Dr. Sutomo No.54, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk Coordinate: -7.604327473890022, 111.8976572945858
11.7	ULP Ngoro	Jl. Suropati No.5, Kec. Ngoro, Kab. Jombang Coordinate: -7.687914703103292, 112.27196608564918
11.8	ULP Pacet	Jl. Komando Hayam Wuruk No. 25, Kec. Pacet, Kab. Mojokerto Coordinate: -7.657151715712359, 112.53654580414177
11.9	ULP Ploso	Jl. Raya Ploso-Babat No.3, Kec. Ploso, Kab. Jombang Coordinate: -7.4407364725480925, 112.22595155730531
11.10	ULP Warujayeng	Jl. Basuki Rahmad No. 17A, Kec. Warujayeng, Kab. Nganjuk Coordinate: -7.625556351257883, 112.02216281232326
12	UP3 Pamekasan	Jl. Jokotole No. 127A, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan Coordinate: -7.160881910760965, 113.49226388124816
12.1	ULP Ambunten	Jl. KH. Hasyim Asyari, Kec. Ambunten, Kab. Sumenep Coordinate: -6.886261260548867, 113.74041215464696
12.2	ULP Bangkalan	Jl. Letnan Mestu No.4, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan Coordinate: -7.026136881367906, 112.75044598348352
12.3	ULP Blega	Jl. Raya Blega No. 30, Kec. Blega, Kab. Bangkalan Coordinate: -7.120859619325816, 113.06835788348417
12.4	ULP Kamal	Jl. Trunojoyo No. 27, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan Coordinate: -7.149267470893375, 112.71477468374427
12.5	ULP Kep. Kangean	Jl. Sriwijaya, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep Coordinate: -6.858621350732034, 115.28849982357747
12.6	ULP Ketapang	Jl. Raya Ketapang-Banyuates, Kec. Ketapang, Kab. Sampang Coordinate: -6.895254765391785, 113.2813934546471
12.7	ULP Pamekasan	Jl. Kesehatan, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Coordinate: -7.157370154531353, 113.48541478348427
12.8	ULP Sampang	Jl. Trunojoyo No.63, Kec. Sampang, Kab. Sampang Coordinate: -7.200470821917897, 113.25090094115596
12.9	ULP Sumenep	Jl. Urip Sumoharjo, Kec. Kotasumenep, Kab. Sumenep Coordinate: -7.013264023747347, 113.86941699697641
12.10	ULP Waru	Jl. Raya Blaban No. 2, Kec. Barumarmar, Kab. Pamekasan Coordinate: -6.900613888212766, 113.48532696063498
13	UP3 Pasuruan	Jl. Panglima Sudirman No. 69, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Coordinate: -7.6525547,112.8979683

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
13.1	ULP Bangil	Jl. Mangga No. 68, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan Coordinate: -7.602592094571757, 112.77662021404068
13.2	ULP Gondang Wetan	Jl. Raya Kejayan No. 144, Kec. Kejayan, Kab. Pasuruan Coordinate: -7.6960633, 112.8776460
13.3	ULP Grati	Jl. Raya Kedung Bako, Km.8, Kec. Rejoso, Kab. Pasuruan Coordinate: -7.6274, 112.945267
13.4	ULP Kraksaan	Jl. Rengganis No. 99, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo, Coordinate: -7.759774, 113.4147996
13.5	ULP Pandaan	Jl. Raya Kasri No. 48 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan Coordinate: -7.6500302, 112.68816708
13.6	ULP Pasuruan	Jl. Diponegoro, No. 1, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Coordinate: -7.6428585, 112.9084763
13.7	ULP Prigen	Jl. Taman Wisata No. 543, Kec. Tretes, Kab. Prigen Coordinate: -7.696333, 112.631114
13.8	ULP Probolinggo	at Jl. Dr Sutomo No. 60 Kec. Mayangan, Kota Probolinggo Coordinate: -7.7498015, 113.2085234
13.9	ULP Sukorejo	Jl Raya Buluagung No. 56, Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan Coordinate: -7.7391611, 112.7270698
14	UP3 Ponorogo	Jl. Arif Rachman Hakim No. 8, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Coordinate: -7.844953, 111.476346
14.1	ULP Balong	Jl. Jend. Sudirman No.12, Kec. Balong, Kab. Ponorogo Coordinate: -7.951655, 111.438792
14.2	ULP Pacitan	Jl. Jend. A. Yani No.94, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Coordinate: -8.195307268696597, 111.09659711351047
14.3	ULP Trenggalek	Jl. Dr Sutomo No. 34, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo Coordinate: -7.868520, 111.472420
14.4	ULP Trenggalek	Jl. Kis Mangunsarkoro No.7, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek Coordinate: 8.049987, 111.717096
15	UP3 Sidoarjo	Jl. Ahmad Yani No.47-49, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Coordinate: -7.4494654260421305, 112.71825041618933
15.1	ULP Krian	Jl. Ki Hajar Diwantoro No. 11, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo Coordinate: -7.4112275150134685, 112.57778286653408
15.2	ULP Porong	Jl. Raya Pangkemiri No. 18, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo Coordinate: -7.493563078315474, 112.67112643179192
15.3	ULP Sidoarjo Kota	Jl. Ahmad Yani No.47-49, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo Coordinate: 7.4494654260421305, 112.71825041618933
16	UP3 Situbondo	Jl. Cempaka No. 35, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo Coordinate: -7.7118379307024005, 113.99725708809487
16.1	ULP Asembagus	Jl. Raya Banyuputih, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo Coordinate: -7.7501093, 114.2268099
16.2	ULP Besuki	Jl. Gunung Ijen, Kec. Besuki, Kab. Situbondo Coordinate: -7.7379564, 113.6907781
16.3	ULP Bondowoso	Jl. Kolonel Sugiono, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso Coordinate: -7.9176386, 113.8294858
16.4	ULP Panarukan	Krajan Timur, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo Coordinate: -7.7118379307024005, 113.99725708809487
16.5	ULP Wonosari	Jl. Raya Situbondo, Tapen, Kab. Bondowoso Coordinate: -7.8759219, 113.9118142

Table 3. UID Jatim's Detailed Business Location

No.	Unit Business	Address
17	UP3 Surabaya Barat	Jl. Taman Bar. No.48, Taman, Kab. Sidoarjo Coordinate: -7.353419040539072, 112.69495930002113
17.1	ULP Menganti	Jl. Raya Bringkang, Pakupari, Kec. Menganti, Kab. Gresik Coordinate: -7.301472425139031, 112.56473352710175
17.2	ULP Karangpilang	Jl. Raya Mastrip 114, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya Coordinate: -7.33461753541963, 112.70449370451142
17.3	ULP Taman	Jl. Raya Geluran, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Coordinate: -7.301467857739009, 112.56473582946957
18.	UP3 Surabaya Selatan	Jl. Ngagel Timur No. 14, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Coordinate: -7.288610156975076, 112.7498796145707
18.1	ULP Darmo Permai	Jl. Raya Darmo Permai Utara No. 5, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya Coordinate: -7.3014689995884074, 112.5647369806547
18.2	ULP Dukuh Kupang	Jl. Raya Dukuh Kupang No. 157, Kec. Sawahan, Kota Surabaya Coordinate: -7.301476992537063, 112.5647392830248.
18.3	ULP Gedangan	Jl. Sawo Tratatap No.Km.15, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo Coordinate: -7.301473566988522, 112.56473467828523
18.4	ULP Ngagel	Jl. Ngagel Timur No. 14, Kec. Gubeng, Kota Surabaya Coordinate: -7.287741533971661, 112.74975791531983
18.5	ULP Rungkut	Jl. Rungkut Industri VIII No. 27, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Coordinate: -7.335709309477891, 112.75043580097099
19	UP3 Surabaya Utara	Jl. Gemblongan No. 64, Kec. Bubutan, Kota Surabaya, Coordinate: -7.253080772597481, 112.73701372775925
19.1	ULP Embong Wungu	Jl. Dr. Soetomo No.42, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya Coordinate: -7.281183613423015, 112.73995877107843
19.2	ULP Indrapura	Jl. Indrapura No. 48, Kec. Krembangan, Kota Surabaya Coordinate: -7.233849, 112.7310867
19.3	ULP Kenjeran	Jl. Kedinding Lor No.25, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya Coordinate: -7.2658058, 112.7080988
19.4	ULP Perak	Jl. Tanjung Sadari No. 82, Kec. Krembangan, Kota Surabaya Coordinate: -7.2251115, 112.7249496
19.5	ULP Ploso	Jl. Ploso Tim. III No.1, Ploso, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya Coordinate: -7.2567659, 112.7698973
19.6	ULP Tandes	Jl. Margomulyo No. 44, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Coordinate: -7.2365432, 112.6824163

Appendix 2: ESMP Matrix

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
New Feeders Construction for New GI Operations (Improved JTM Reliability)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	Ecological, physical, social (land use)	Medium Voltage Power Network development plan (SKTM), which consists of: 1. The route and plan the length of SKTM; 2. Trees cutting that cannot be avoided; 3. Trees under the <i>Right of Way</i> (ROW) that must be trimmed	There are no significant potential negative impacts	In designing the route: 1. avoid cutting trees on both public and private land; 2. make preliminary agreements with potentially affected parties including private land owners whose land has to be used; 3. socialization about the ROW	The entire path of the project	F: One time W: Initial Planning	1. Routings to avoid private land, forestry; 2. Evidence of agreement with land and trees owners; 3. Socialization notes on ROW safety based on safe distances according to the PLN board of directors’ regulations;	Implementati on Unit
		Some of the JTM routes and poles are on agricultural land, forest areas, part of houses / private land, so that the minimum ROW	Potential negative impacts: increased disturbance from tree branches, buildings on the ROW	4. In order to prevent erosion and poor foundations: 1) investigate the location of piles along the SKTM route; 2) ensure			4. There are no reports of landslides at the pole location	Implementati on Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
		distance of 3 meters cannot be fulfilled		that the demolition is done properly to avoid landslides				
		PLN installation Disassembly at SKTM	The possibility of erosion and landslides in the area					
		SKTM development plans in cultural heritage areas or areas where there are potential discoveries of new historical sites	The SKTM development plan has the potential to disturb and damage cultural heritage objects	1. Obtain a permit or recommendation from the cultural heritage management authority 2. PLN and the Contractor implement cultural heritage handling procedures for the distribution network		F: One time W: Initial Planning	1. Permission / recommendation from the official authority 2. Consultations note with community leaders and relevant authorities	Implementation Unit
2	Social	Preparation of ROW lines and pole locations	Dissatisfaction relates to land use for the	Avoid the use of private land, and indigenous group areas by PLN	ROW path	F: one time W: The Beginning	1. The existence of a clear PLN ROW route and as far as possible	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
			ROW, location of poles and substations	Consultation and socialization to land owners and community leaders by PLN (and the Contractor)	ROW lines, poles and substations	of The Planning	avoid the use of private land and indigenous group areas 2. Consultation's documentation with affected communities explaining the ROW restrictions	
				PLN makes land use agreements with land owners		F: As needed until all agreements with land owners are collected W: Planning	Documentation of land use agreements (according to point A. 1)	
B	Construction							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Excavation for cables, holes for poles, erecting piles, laying ground cables, installing TM construction and supporting accessories	Negative impacts on safety, health and social of construction workers on workers and society	1. CSMS certified contractor 2. Identification of hazards from work (IBPR) / (job safety analysis) 3. Work permit for hazardous work 4. Compliance with SMK3 Government Regulation No. 50 of 2012 4. Implement SOP in accordance with the work 5. signs Installation in accordance with the guidelines 6. Officers and supervisors are equipped with standard Personal Protective Equipment (PPE) 7. Stop Working Authority Inspection 8. LOTO procedure	At each project site, along the ROW	F: Once W: the beginning of construction	1. No work accident 2. Danger signboard and safety of dug holes due to the construction 2. Records of public concern inspections by contractors 3. There is no reprimand or termination of work from the officer Stop working authority	The contractor supervised by the implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				9. The contractor maintains the required ethics during the construction phase				
2	Social and Traffic	Materials and equipment transportation using a vehicle that is not feasible or exceeds the capacity of the vehicle / road or the speed exceeds the allowable limit Materials placement, equipment up on the road when the installation work in progress will disrupt traffic	The possibility of traffic disturbances such as: congestion, road damage, as a result of spilled construction material during transportation, the spread of soil, gravel and project materials on the body of the road. Construction waste spread on the road	1. Placing traffic control officers at the project site; 2. Install information signs that work is in progress 3. Prevent scattered construction materials on the road 4. Provide a special location for placing the materials (not on the road) 5. Comply with traffic regulations and instructions for orderly use of roads NO. 004 / T / BNKT / 1990			1. Information on outage plans to customers 2. Work in progress information signboard 3. There is a special location for placing the materials 4. No traffic disruption 5. Construction material does not contaminate the body of the road	
C	Operational							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	The electric voltage generated from the operating power grid	Negative impacts on safety, health and social impact on surrounding communities and workers	1. Perform a periodic inspection 2. Installing a danger sign on the PLN assets that have a voltage 3. Socialization to the public regarding safe distances	At each project site, along the ROW	F: Through-out operations W: Through-out Operations	1. There are no accidents reports on the general public and the workers 2. Inspection notes 3. Documentation of socialization to the general public regarding safe distances	Implementati on Unit
Old Material Replacement (JTM Reliability Improvements)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	-	Inspection of existing network	There is no potential negative impact	-	-	-	-	-

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
B	Consruction							
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Replacement of TM construction and accessories	Disturbance to customers due to power outages and potential work accidents	1. Provide information on outage plans to customers through social media or letters to related parties; 2. Carry out load mauver scenarios before and after the work 3. CSMS certified contractor 4. Occupational hazard identification (IBPPR) /JSA 5. Work permit for hazardous work 6. Compliance with SMK3 Government Regulation No. 50 of 2012 7. Implement SOP in accordance with the work 8. signs Installation in accordance with the guidelines 9. Officers and supervisors are equipped with	The entire existing distributio n network	F: Once W: the beginning of construction	1. Information on outage plans to customers 2. Project implementation signs 3. There are no reports of work accidents 4. There is no reprimand or termination of work from the officer Stop working authority	UID

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				standard Personal Protective Equipment (PPE) 10. Stop Working Authority Inspection 11. LOTO procedure				
2	Electronic waste	Replacement of damaged equipment (Returning the old materials)	1. The damaged (old) material is left at the work site so that it has the potential to pollute the environment 2. The damaged (old) material is taken by the workers so that the potential for contamination cannot be controlled 3. The damaged (old) material storage is not neatly arranged so that it has the potential to pollute the environment	1. Carry out orderly administrative actions and control the amount of material being unloaded and returned by arranging the ATTB warehouse in accordance with the Warehouse SOP 2. Implementing the Hazardous Waste Management SOP, 3. Preventive Procedures Cross-contamination PCB, 4. Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	The entire existing distribution network	F: Once W: when the construction is finished	1. Notes on the implementation of replacement of tools and materials (in and out of the warehouse) 2. The recording damaged equipment / materials (ATTB) results in the ATTB warehouse management system 3. There are no reports of environmental pollution	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				5. Procedure for Handling Spilled Oil / Transformer Oil				
C	Operational							
1	Electronic waste	Handling, storage and disposal of used materials	Used material stacking in the warehouse	1. Arrangement in the warehouse according to the type of material 2. Used material auction 3. Implementing the Hazardous Waste Management SOP 4. Preventive Procedures PCB Cross Contamination 5. Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste 6. Procedure for Handling Spilled Oil / Transformer Oil	Warehouse/Storage	F: During operation W: During operational phase	1. Arrangement of materials in accordance with the 5S principle 2. There are no reports of environmental pollution	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
Old Transformers Replacement (JTM Reliability Improvements)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	-	Inspection of existing transformer condition	There is no potential negative impact	-	-	-	-	-
B	Construction							
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Replacement of old transformers and its accessories	There are work accidents during the work process	1. CSMS certified contractor 2. Occupational hazard identification (IBPPR) /JSA 3. Work permit for hazardous work 4. Compliance with SMK3 Government Regulation No. 50 of 2012 5. signs Installation in accordance with the guidelines 6. Officers and supervisors	In accordance with the transformer replacement plan	F: Once W: as per the replacement plan	1. Danger sign 2. There are no reports of work accidents 3. There is no reprimand or termination of work from the officer Stop working authority	Implementing Unit (for announcements of power outages for customers) The contractor, under the supervision of the Implementing Unit, puts up a work

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				are equipped with standard Personal Protective Equipment (PPE) 7. Stop Working Authority Inspection 8. Works in accordance with Construction Standards for installation, dismantling and transportation of electrical equipment 9 Procedure for Handling Spilled Oil / Transformer Oil (in case of leakage) 10. LOTO procedure				implementati on sign and a danger sign
2	Social and Traffic		1. Power failures on the customer as a result of outages during the replacement of transformers and	1. Provide power outage information to customers; 2. Put up a sign that work is in progress to road users			1. Documentation of outage plan information to customers 2. Documentation of work is in progress sign installation	

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
			accessories 2. Traffic congestion				3. No traffic disruption	
3	Waste	Returning the old transformer to the warehouse	1. Transformer oil seepage upon replacement and returning the transformer 2. The missing transformer components are taken by workers, causing oil to leak	1. Prepare pallets and containers to anticipate seepage / leakage of oil from the transformer; 2. Orderly administrative and supervision of the number of transformers and components returned 3. Works in accordance with Construction Standards for installation, dismantling and transportation of electrical equipment 4. Implementing the Hazardous Waste Management SOP	The entire existing distribution network	F: Once W: when the construction is finished	1. There is no oil seepage from the transformer during replacement and returning activities to the warehouse 2. There are no reports of environmental pollution 3. Material return documentation	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				5. Preventive Procedures cross-contamination PCB, 6. Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste, 7. Procedure for Handling Spilled Oil / Transformer Oil				
C	Operational							
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	The electric voltage caused by leakage currents and voltages from the operating power grid	Negative impacts on safety, health and social impact on surrounding communities and workers	Periodic grid inspections to ensure compliance with ROW requirements	At each project site, along the ROW	F: Periodic W: Through-out Operations	1. Inspection report 2. There are no accidents reports on the general public and the workers	Implementati on Unit
2	Waste	Handling and storage of used transformers	1. Soil and water contaminated with transformer oil; 2. Stacking of used transformers in storage sheds	1. Arrangement in warehouse at special warehouse facilities; 2. Storage of used transformers in accordance with SOP	Ware-house Storage	F: During operation W: During operation phase	1. No oil spills from the transformer in the warehouse 2. The used transformer that is stored is empty and covered with a cover to protect it from	UID and / or Implementing Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				3. Setting up a process for assets removal 4. Implementing the Hazardous Waste Management SOP, 5. Preventive Procedures Cross-contamination PCB, 6. Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste, 7. Procedure for Handling Spilled Oil / Transformer Oil			rain 3. Asset disposal process document	
Key Point Replacement and Installation: LBS, Recloser, DS (JTM Reliability Enhancement)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	-	Inspection of existing key point and its network	There is no potential negative impact	-	-	-	-	-
B	Construction							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Key point Installation and Replacement	There are work accidents during the work process	1. Danger sign Installation 2. Officers and supervisors are equipped with PPE according to the standard 3. The contractor has a CSMS certificate (Contractor Safety Management System) 4. Hazard identification of the work (IBPPR) or JSA (job safety analysis) 5. Implement SOP in accordance with the work 6. working permit, 7. workers competencies 8. Compliance with SMK3 Government Regulation No. 50 of 2012 9. Conduct periodic inspections by Stop	According to the key point replacement plan	F: Once W: as per the replacement plan	1. Danger sign 2. There are no reports of work accidents 3. There is no reprimand or termination of work from the officer Stop working authority	Implementing Unit (for announcements of customer power outages); The contractor, under the supervision of the Implementing Unit, puts up a sign of work implementation and a danger sign

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				Working Authority officers 10. LOTO procedure				
2	Social and Traffic		1. Electricity users are interrupted due to a blackout during the work on replacing the keypoint and its accessories; 2. The existence of traffic congestion due to project activities	1. Providing information to customers 2. Work is in progress sign installation 3. assigning traffic control officer			1. Information on outage plans to customers 2. Work in progress information signboard 3. Documentation of no traffic disruptions	
3	Waste	Returning the keypoint material and its accessories	1. Damaged (old) keypoint material and / or its accessories are left at the job site so that it becomes waste; 2. The damaged (old) material is taken by the workers so that the potential for contamination cannot be controlled	1. Orderly administrative and control of the quantity of materials to be unloaded and returned 2. Arrangement of ATTB warehouse in accordance with the Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	The entire existing distribution network	F: Once W: the construction is complete	1. Arrangement of materials in accordance with the 5S principle 2. Material return documents	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
			3. The damaged (old) material storage is not neatly arranged so that it has the potential to pollute the environment					
C	Operational							
1	Social	Periodic maintenance of the keypoint and installing a lock on the cover panel	There are no significant potential negative impacts	Notify surrounding customers if there will be a power outage	All keypoints in the existing distribution network	F: During operation W: During operational phase	There are no reports of keypoint interference	Implementation Unit
2	Waste	Handling, storage and disposal of keypoint material and its accessories	Keypoint material stacking in the warehouse	Arrangement of ATTB warehouse in accordance with the Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	Warehouse/ Storage	F: During operation W: During operational phase	The material arrangement is in accordance with the 5S rules	Implementation Unit
Construction of JTM / JTR / Substation (Marketing)								
A	Pre-Construction/Planning							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	Ecological, physical, social (land use)	Calculation: 1. Trees that have to be cut down; 2. Number of poles mounting point plan TM / TR and substations; 3. Cable requirements according to JTM / JTR lines and substations	There are no significant potential negative impacts	1. Preliminary agreements with potentially affected parties; 2. Socialization of the 3 meter ROW distance for land owners; 3. Carry out construction according to construction standards	The entire path of the project	F: One time W: Initial Planning	1. Records of agreements / permits with land and tree owners 2. Socialization notes on ROW safety based on safe distances according to the PLN board of directors' regulations	Implementati on Unit
		There are poles that are placed on agricultural land, forest areas, part of a house / private land	The safe distance from the ROW is not achieved because the network ROW is not fulfilled at least 3 meters which will have a negative impact on land owners			F: one time W: Early Planning (route determinat ion)	1. A route that considers environmental and social aspects 2. Optimal use of public land to avoid private land 3. There is no damage to the pile due to landslides or erosion	Implementati on Unit
		Damage to the pile foundation building (collapsed or tilted) due to landslide or erosion	Damage to poles resulting in a power outage which causes disruption to electricity users					

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
		Activity is on sites of cultural heritage	The SKTM development plan has the potential to disturb and damage cultural heritage objects	1. Obtain a permit or recommendation from the cultural heritage management authority 2. PLN and the Contractor implement cultural heritage handling procedures for the distribution network		F: One time W: Initial Planning	1. Permission / recommendation from the official authority 2. Consultation note with community leaders	Implementation Unit
2	Social	Preparation of ROW lines and pole locations	Dissatisfaction relates to land use for the ROW, location of poles and substations	Avoid the use of private land, and indigenous group areas by PLN Consultation and socialization of the importance of ROW, substations and poles to land owners and community leaders by PLN (and the Contractor)	ROW path ROW lines, poles and substations	F: one-time W: The Beginning of The Planning	1. The use of privately owned land and indigenous group areas by PLN is insignificant 2. Recording the consultation and socialization with affected communities explaining the importance of poles, substations and restrictions on the ROW	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				The land use agreement from the land owner is collected by PLN		F: As needed until all agreements with land owners are collected W: Planning phase	Documentation of land use agreements (according to point A. 1)	
B	Construction							
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Excavation for cables, holes for poles, erecting poles, ground cables installation, installing TM / TR / substation's construction and supporting accessories	The negative impact on the safety, health and the social construction workers to the community	1. Danger sign Installation 2. Officers and supervisors are equipped with PPE according to the standard Applying ethics required during the construction phase 3. The contractor has a CSMS certificate	At each project site, along the ROW	F: Once W: the beginning of construction	1. Danger sign Installation 2. Officers use PPE properly and completely in accordance with the requirements 3. There are no reports of work accidents 4. There is no reprimand or termination of work	The contractor supervised by the implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
				(Contractor Safety Management System) 4. Hazard identification of the work (IBPPR) or JSA (job safety analysis) 5. Implement SOP in accordance with the work 6. working permit, 7. workers competencies 8. Compliance with SMK3 Government Regulation No. 50 of 2012 9. Conduct periodic inspections by Stop Working Authority officers 10. LOTO procedure			from the officer Stop working authority.	
2	Social and Traffic	Material Placement during installation work	Traffic jams and accidents due to project materials, scattering of soil, gravel and project materials outside the project site, and a	1. Placing traffic control officers at the project site; 2. Install information signs that work is in progress; 3. Prevent scattered construction materials on the road			1. Information on outage plans to customers 2. Work in progress information signboard 3. There is a special	

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
			power outage due to construction activities	4. Provide a special location for placing the materials (not on the road) 5. Comply with traffic regulations and instructions for orderly use of roads NO. 004 / T / BNKT / 1990			location for placing the materials 4. No traffic disruption 5. Construction material does not contaminate the body of the road	
3	Damage to the plant and construction Waste	installation of the construction of TM/TR/Substation	The existence of waste from the installation / construction activities of TM / TR / substations such as Haspel	Cleaning up waste / garbage after work completion			There is no residual waste from the work site Repairing the damage plants according to the agreement	
				1. Agreement with the owner for the plant/tree replacement ; 2. Cleaning up waste / garbage after work completion of				
C	Operational							
1	OHS- Worker and Community	Electrical voltage generated from the operating power grid and substations	Negative impacts on safety, health and social impact on surrounding	1. Perform periodic inspections	At each project site, along the ROW	F: During Operations W: During Operations	1. There are no accidents reports on the general public and the workers;	Implementati on Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
	Health and Safety		communities and workers	2. Installing a danger sign on the PLN assets that have a voltage 3. Socialization related to safety distance			2. Documentation socialization/ public consultation with the community related to the safe distance	
APP Installation (Marketing)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	-	Survey the location of the APP installation plan	There is no potential negative impact	-	-	-	-	-
B	Construction							
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	APP installation	There was a work accident while the work was in progress	1. Officers and supervisors have attended work safety training; 2. Officers and supervisors are equipped with PPE according to the standard 3. Implement SOP according to work	Fit to the APP installation location	F: Once W: the beginning of construction	There are no reports of work accidents	Implementation Unit
C	Operational							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Electricity generated on APP	Negative impacts on safety, health and social impact on surrounding communities and workers	1. APP Installation in accordance with the construction standards and an alarm installation if needed 2. Providing information on danger signs on APP	Fit to the APP installation location	F: Through-out operations W: Through-out Operations	1. Customer IML already has SLO 2. There are no accidents reports on the general public and the workers	Implementati on Unit
Replacement of 1 Phase/3 Phase meter boxes (Efficiency)								
A	Pre-Construction/Planning							
1	Social	Data collection of damaged/old/ stuck/ blurry meter boxes	There was a refusal to replace the meter boxes from the customer	Socialization and education regarding the meter boxes replacement	Fit to meter boxes replaceme nt	F: Once W: the beginning of constructio n	Socialization notes at the time of socialization	Implementati on Unit
B	Construction							

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
1	OHS - Worker and Community Health and Safety	Installation of meter boxes replacement	There was a work accident while the work was in progress	1. Officers and supervisors have attended work safety training; 2. Officers and supervisors are equipped with PPE according to the standard	Fit with consumer meter boxes installation	F: Once W: the beginning of construction	There are no reports of work accidents	Implementation Unit
2	Waste		1. Old meter boxes are scattered outside the warehouse so that the potential for pollution cannot be controlled. 2. Arrangement of ATTB warehouse in accordance with the Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	1. Orderly administrative and control of the quantity of materials to be unloaded and returned 2. Arrangement of ATTB warehouse in accordance with the Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	Fit with consumer meter boxes installation	F: Once W: at the end of one construction phase	1. Material return documents	Implementation Unit
C	Operational							
1	Waste	Handling, storage and disposal of used meter boxes materials	Used meter boxes material stacking in the warehouses	Arrangement of ATTB warehouse in accordance with the Procedure for Managing Used Materials and Non-B3 Waste	Warehouse/Storage	F: During operation W: During operational phase	The material arrangement is in accordance with the 5S rules	Implementation Unit

ESMP Matrix

No	Impact Category	Impact Activities/Resources	The Negative Impact Potential	Management Efforts (ME)	Monitoring			
					Location	Frequency and Time	Performance Indicators	Management Institutions
2	Social		Theft of meter boxes	Good administrative in data collection on the stored meter boxes	Warehouse/Storage	F: During operation W: During the storage phase	There are no findings / reports of theft of the meter boxes	Implementation Unit

*OFFICIAL USE ONLY

Appendix 3: List of Environmental Approvals and Permits

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
1	UID Jatim	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UID Jatim No. 6660/539/436.7.2/2009, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 10 September 2009 b. DPLH Recommendation for 20 kV Electricity Network for East Java Distribution Area No. 660/11562/111.2/2020, issued by Environment Agency of East Java Province dated 18 May 2020 c. Environment Permit of DPLH 20 Kv Electricity Network for East Java Distribution Area No. 17.05/3/02/V/2020, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of East Java Province dated 20 May 2020
2	UP3 Banyuwangi	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Banyuwangi No. 660/2967/429.207/2009, issued by Regional Secretariat of Banyuwangi Regency dated 8 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Genteng No. 660.2/157/SPPL/VIII/2017, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 03 August 2017 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Jajag No. 660.2/159/SPPL/VIII/2017, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 03 August 2017 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Muncar No. 660.2/160/SPPL/VIII/2017, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 03 August 2017 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Rogojampi No. 660.2/158/SPPL/VIII/2017, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 03 August 2017 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Banyuwangi Kota No. 660.2/158/SPPL/VIII/2017, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 03 August 2017 g. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 660/124/429.104/2018, issued by Environment Agency of Banyuwangi Regency dated 17 January 2018
3	UP3 Bojonegoro	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Bojonegoro No. 660/677/207.412/2009, issued by Environment Agency of Bojonegoro Regency dated 24 August 2009 b. DPLH Office Building of PT PLN (Persero) ULP Lamongan No. 660/202/413.117/2018, issued by Environment Agency of Lamongan Regency 22 January 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Babat No. 660/555.SPPL/413.117/2020, issued by Environment Agency of Lamongan Regency dated 30 September 2020

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Brondong No. 660/556.SPPL/413.117/2020, issued by Environment Agency of Lamongan Regency dated 30 September 2020 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Jatirogo No. 660/349.SPPL/413.112/2020, issued by Environment Agency of Tuban Regency dated 22 December 2020 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tuban No. 660/350.SPPL/413.112/2020, issued by Environment Agency of Tuban Regency dated 22 December 2020 g. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 188/1789/Kep/413.111/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Lamongan Regency dated 14 May 2018
4	UP3 Gresik	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Gresik No. 660/557A/437.75/2009, issued by Environment Agency of Gresik Regency dated 01 October 2009 b. DPLH Recommendation for Bawean Diesel Power Plant No. 660/183/DPLH/437.75/2017, issued by Environment Agency of Gresik Regency dated 26 October 2017 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Benjeng No. 660/337/SPPL/437.75/2017, issued by Environment Agency of Gresik Regency dated 8 December 2017 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Giri No. 660/336/SPPL/437.75/2017, issued by Environment Agency of Gresik Regency dated 8 December 2017 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sidayu No. 660/169/SPPL/437.75/2018, issued by Environment Agency of Gresik Regency dated 29 October 2018
5	UP3 Jember	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Jember No. 660.1/291/512/2009, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 16 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ambulu, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Jember Kota, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kalisat, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kencong, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Klakah No. 366/SPPL/XII/2018, issued by Environment Agency of Lumajang Regency dated 18 December 2018 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Lumajang No. 367/SPPL/XII/2018, issued by Environment Agency of Lumajang Regency dated 18 December 2018 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Rambipuji, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018 i. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tanggul, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 11 December 2018 j. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tempeh No. 364/SPPL/XII/2018, issued by Environment Agency of Lumajang Regency dated 18 December 2018 k. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 660.1/1409/35.09.319/2017, issued by Environment Agency of Jember Regency dated 19 December 2017
6	UP3 Kediri	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Kediri No. 660/193/419.37/2009, issued by Environment Agency of Kediri City dated 23 October 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kediri Kota No. 660/057/AMD/419.111/2018, issued by Environment Agency of Kediri City dated July 8, 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tulungagung No. 660.1/151/SPPL/118/2018, issued by Environment Agency of Tulungagung Regency dated 16 July 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngunut No. 660.1/150/SPPL/118/2018, issued by Environment Agency of Tulungagung Regency dated 16 July 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Srengat No. 660/143/409.113.2/2018, issued by Environment Agency of Blitar Regency dated 08 August 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pare No. 660.1/276/418.35/2018, issued by Environment Agency of Kediri Regency dated 28 June 2018 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Wlingi No. 660/131/409.113.2/2018, issued by Environment Agency of Blitar Regency dated 19 July 2018 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sutojayan No. 660/140/409.113.2/2018, issued by Environment Agency of Blitar Regency dated 07 August 2018 i. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngadiluwih No. 660.1/275/418.35/2018, issued by Environment Agency of Kediri Regency dated 28 June 2018

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		j. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Grogol No. 660.1/274/418.35/2018, issued by Environment Agency of Kediri Regency dated 28 June 2018 k. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Blitar No. 660.1/13/410.2081/SPPL/VII/2018, issued by Environment Agency of Blitar Regency dated 19 July 2018 l. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Campurdarat No. 660.1/149/SPPL/118/2018, issued by Environment Agency of Campurdarat Regency dated 16 July 2018 m. Environment Permit for Bangsongan guard office No. 503.11.05/1987/418.27/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Kediri Regency dated 09 July 2018 n. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 503.11.01/1814/418.27/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Kediri Regency dated 28 June 2018
7	UP3 Madiun	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Madiun No. 660/532/401.304/2009, issued by Environment Agency of Madiun City dated 9 October 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Magetan No. 493, issued by Environment Agency of Magetan Regency dated 25 April 2019 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngawi No. 660/547/404.111/2018, dated 06 July 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Maospati No. 942, issued by Environment Agency of Magetan Regency dated 26 June 2018 e. DPLH Office Building of PT PLN (Persero) ULP Caruban No. 660.1/3594/402.117/2018, dated 28 December 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Dolopo No. 436/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Madiun Regency dated 22 November 2018 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Mantingan No. 660/3556/404.111/2019, dated 16 April 2019 h. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 503.44/003/401.106/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Madiun City dated 04 September 2018
8	UP3 Malang	a. DPLH Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Malang Customer Service Unit No. 660/287/35.73.406/2009, issued by Environment Agency of Malang City dated 15 September 2009

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		b. SPKPPLH Office Building of PT PLN (Persero) ULP Lawang No. 660.4/5092/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Bululawang No. 660.4/5089/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Batu No. 660/611/DL/422.110/2019, dated 30 July 2019 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Singosari No. 660.4/5088/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kepanjen 660.4/5091/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 g. SPPL Office Building PT (PLN (Persero) ULP Kebonagung No. 107/SPPL/35.73/307/2019, dated 03 May 2019 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tumpang No. 660.4/5085/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 i. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Gondanglegi No. 660.4/5093/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 j. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Dampit No. 660.4/5094/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 k. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngantang No. 660.4/5090/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 l. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sumberpucung No. 660.4/508735.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 m. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Dinoyo No. 109/SPPL/35.73/307/2018, issued by Environment Agency of Malang City dated 20 December 2018 n. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Blimbing No. 660.4/5086/35.07.117/2018, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018 o. SPKPPLH Hazardous Waste Temporary Storage No. 660.4/4476/SKPPLH/35.07.117/2017, issued by Environment Agency of Malang Regency dated 12 November 2018
9	UP3 Mojokerto	a. UKL-UPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Mojokerto No. 660/437/416-203.A/2009, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Mojokerto Regency dated 12 February 2019

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		b. SPPL Office Building PT (PLN (Persero) ULP Mojoagung No. 78/SPPL-B/2017, issued by Environment Agency of Jombang Regency dated 29 May 2017 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Mojokerto Kota No. 660/1832/417.312/2018, dated 17 May 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Jombang No. 203/SPPL-B/2018, issued by Environment Agency of Jombang Regency dated 16 November 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngoro No. 97/SPPL-B/2018, dated 7 May 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Mojosari No. 48/SPPL/2018, dated 24 September 2018 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ploso No. 96/SPPL/2018, dated May 7, 2018 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pacet No. 47/SPPL/2018, dated 24 September 2018 i. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kertosono No. 660/2199/411.315/2018, dated 14 August 2018 j. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Warujayeng No. 660/2197/411.315/2018, dated 14 August 2018 k. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Nganjuk No. 660/2198/411.315/2018, dated 14 August 2018
10	UP3 Pamekasan	a. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Pamekasan No. 660/322/441.407/2009, issued by Regional Secretariat of Pamekasan Regency dated 24 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pamekasan No. 660.1/229/432.310/Dok.Lingk/2018, issued by Environment Agency of Pamekasan Regency dated 30 October 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sumenep No. 660.1/165/432.310.Dok.Lingk/2019, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 25 March 2019 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sampang No. 660/775/434.219/2019, issued by Environment Agency of Sampang Regency dated 27 March 2019 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Bangkalan No. 041-2018, issued by Environment Agency of Bangkalan Regency dated 14 November 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kamal No. 194 - 2019, dated 21 November 2019 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ketapang No. 660/217/434.219/2019, dated 27 March 2019 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Blega No. 082/2019, dated 3 July 2019

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		i. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Prenduan No. 660/137/REKOM.013/435.119.2/2019, dated 13 March 2019 j. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ambunten No. 660/146/REKOM.013/435.119.2/2019, dated 13 March 2019 k. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Waru No. 660.1/165/432.310.Dok.Lingk/2019, dated 25 March 2019 l. UKL-UPL Recommendation for Gili Genting Diesel Power Plant No. 660/663/DPLH.030/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 20 December 2017 m. UKL-UPL Recommendation for Gili Iyang Diesel Power Plant No. 660/60/UKL-UPL.027/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 20 December 2017 n. UKL-UPL Recommendation for Kangean Diesel Power Plant No. 660/661/DPLH.028/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 20 December 2017 o. UKL-UPL Recommendation for Mandangin Diesel Power Plant No. 660/39/434.219/2018, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 15 January 2018 p. UKL-UPL Recommendation for Raas Diesel Power Plant No. 660/174/UKL-UPL.022/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 03 March 2020 q. UKL-UPL Recommendation for Sapeken Diesel Power Plant No. 660/662/DPLH.029/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 20 December 2017 r. DPLH Recommendation for Sapudi Diesel Power Plant No. 660/664/DPLH.031/435.119.2/2017, issued by Environment Agency of Sumenep Regency dated 20 December 2017 s. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 503/518/DPMPTSP/435.120.4/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Sumenep Regency dated 27 June 2018
11	UP3 Pasuruan	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Pasuruan No. 660/192/423.208/2009, issued by Environment Agency of Pasuruan City dated 31 August 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pasuruan Kota No. SPPL/301/423.110/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan City dated 03 December 2018

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Gondangwetan No. 132/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan Regency dated 13 November 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Bangil No. 131/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan Regency dated 13 November 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pandaan No. 136/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan Regency dated 13 November 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Prigen No. 134/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan Regency dated 13 November 2018 g. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Probolinggo No. 660/2480/425.116/2018, issued by Environment Agency of Probolinggo City dated 11 October 2018 h. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sukorejo No. 135/SPPL/2018, issued by Environment Agency of Pasuruan Regency dated 13 November 2018 i. UKL-UPL Recommendation for Gili Ketapang Diesel Power Plant No. 503/002/426.116/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Probolinggo Regency dated 08 May 2018 j. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 503/003/LB3/423.107/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Pasuruan City dated 23 August 2018
12	UP3 Ponorogo	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Ponorogo No. 660/396/405.26/2009, issued by Environment Agency of Ponorogo Regency dated 02 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ponorogo No. 660/234/405.25/2018, issued by Environment Agency of Ponorogo Regency dated 8 October 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Balong No. 660/231/405.25/2018, issued by Environment Agency of Ponorogo Regency dated 8 October 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Pacitan No. 660.1/174/408.25/2018, issued by Environment Agency of Pacitan Regency dated 27 November 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Trenggalek Customer Service Unit No. 660.1/174/408.25/2018, issued by Environment Agency of Trenggalek Regency dated 28 November 2018
13	UP3 Sidoarjo	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Sidoarjo No. 660/1704/404.6.3/2009, issued by Environment Agency of Sidoarjo Regency dated 25 September 2009

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Sidoarjo Kota No. 660/35/438.5.15/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Sidoarjo Regency dated 13 December 2018 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Porong No. 660/36/438.5.15/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Sidoarjo Regency dated 13 December 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Krian No. 660/3#/438.5.15/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Sidoarjo Regency dated 13 December 2018
14	UP3 Situbondo	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Situbondo No. 660.1/229/431.401.2/2009, issued by Environment Agency of Situbondo Regency dated 24 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Panarukan No. 1279/MUM.00.01/2017, dated 31 July 2017 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Wonosari No. 660.1/1212SPPL/430.9.6/2018, issued by Environment Agency of Bondowoso Regency dated 14 November 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Asembagus No. 1277/MUM.00.01/2017, issued by Environment Agency of Situbondo Regency dated 31 July 2017 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Besuki No. 1278/MUM.00.01/2017, issued by Environment Agency of Situbondo Regency dated 31 July 2017 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Bondowoso No. 660.1/541.2/SPPL/430.9.6/2018, issued by Environment Agency of Bondowoso Regency dated 6 June 2018 g. Hazardous Waste Temporary Storage Permit No. 188.4/I/ILI/431.218/2018, issued by Investment and Integrated One-Stop Services Agency of Situbondo Regency dated 07 February 2018
15	UP3 Surabaya Barat	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Barat No. 660/4062/404.6.3/2015, issued by Environment Agency of Sidoarjo Regency dated 22 December 2015 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Menganti No. 660/43/SPPL/437.75/2017, dated 6 March 2019
16	UP3 Surabaya Selatan	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan No. 660/515/436.7.2/2009, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 8 September 2009

No.	Unit Business	Environmental Approvals and Permits
		b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Darmo Permai No. 660.1/344/436.7.12/2019, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 06 March 2019 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Dukuh Kupang No. 660.1/343/436.7.12/2019, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 06 March 2019 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ngagel No. 660/515/436.7.2/2009, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 08 September 2019 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Rungkut No. 660.1/317/436.7.12/2019, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 27 February 2019
17	UP3 Surabaya Utara	a. DPPL Office Building of PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Utara No. 660/516/436.7.2/2009, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 8 September 2009 b. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Indrapura No. 660.1/1874/436.7.12/2019, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 21 November 2019 c. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Ploso No. 660.1/1333/436.7.12/2018, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 17 October 2018 d. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Tandes No. 660.1/1334/436.7.12/2018, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 17 October 2018 e. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Perak No. 660.1/1334/436.7.12/2018, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 17 October 2018 f. SPPL Office Building of PT PLN (Persero) ULP Kenjeran No. 660.1/1720/436.7.12/2016, issued by Environment Agency of Surabaya City dated 19 October 2016

Appendix 4: List of Indonesia's Environmental and Social Regulations

A. Environmental Regulations

Acts

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia;
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati (UN-CBD);
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim;
9. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
11. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
12. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Stockholm tentang bahan Pencemar Organik yang Persisten;
14. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketengalistrikan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
15. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
16. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
17. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
18. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
19. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
20. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
21. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
22. Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
23. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta kerja.

Government Regulations

1. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Manajemen Bencana

2. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Presidential Decrees, Instructions, and Regulation

1. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Proses Pembangunan
2. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
3. Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 tentang Ratifikasi Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon sebagaimana Disesuaikan dan Diubah oleh Pertemuan Kedua Para Pihak London, 27-29 Juni 1990
4. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 2005 Perubahan atas Protokol Montreal tentang Zat yang Menguras Lapisan Ozon
5. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
6. Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

Ministry Decrees and Regulations

1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan No. 299 Tahun 1996 tentang Arah Teknis Penilaian Sosial dalam AMDAL;
2. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan No. 124 Tahun 1997 tentang Penilaian Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 1 Tahun 2007 tentang Bahan Aktif yang Dilarang dan Pestisida Terbatas;
5. Peraturan Menteri Kehutanan No 30 Tahun 2009 tentang Prosedur Implementasi untuk Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 31 Tahun 2009 tentang Arah dan Kontrol Penerapan Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Penggunaan Teknologi Lingkungan di Daerah;
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 31 Tahun 2009 tentang Arah dan Kontrol Penerapan Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Penggunaan Teknologi Lingkungan di Daerah;

8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Keluhan Masyarakat dan Penanganan Keluhan yang Disebabkan oleh Polusi dan/atau Degradasi;
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk Pengelolaan Hutan di Unit Pengelolaan Hutan Lindung;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang tunduk pada Analisis Dampak Lingkungan;
11. Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penilaian Dampak dan Izin Lingkungan;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Partisipasi Publik dalam AMDAL dan Izin Lingkungan;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 15 Tahun 2013 tentang Pengukuran, Pemberitahuan, dan Verifikasi Tindakan Mitigasi untuk Perubahan Iklim;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
15. Peraturan Menteri Pertanian No. 107 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI);
17. Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis untuk Pengembangan Kawasan Industri;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim;
19. Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MENLHK/SETJEN/SET/1/5/2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.65/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Sektor Kehutanan;
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Prosedur Pengaduan tentang Polusi dan/atau Kerusakan Lingkungan dan/atau Penghancuran Hutan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dalam Penerapan Pengajuan Tunggal secara langsung;
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria untuk Bisnis dan/atau Kegiatan yang Memerlukan Perubahan Izin;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pembebasan Kewajiban untuk Mempersiapkan AMDAL untuk Bisnis dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota Menyiapkan Detail Rencana Tata Ruang;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penentuan Bisnis dan/atau Kegiatan yang Memerlukan Tindakan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;

26. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Bisnis dan/atau Kegiatan yang tunduk pada Analisis Dampak Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
28. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
29. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

Local Government Regulations

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
2. Peraturan Daerah Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031.

PLN Regulations

1. Keputusan Direksi PLN No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
2. Keputusan PT PLN (Persero) No. 200.K/DIR/2009 tentang Revisi Keputusan No. 059.K/DIR/2009 tentang Sistem Evaluasi Tingkat Kinerja PT PLN (Persero);
3. Keputusan PT PLN (Persero) No. 114.K/DIR/2010 tentang Tenaga Trafo;
4. Keputusan Direksi PLN (Keputusan PLN) No. 473/2010 Standar Konstruksi untuk Jaringan Listrik Tenaga Rendah (untuk jalur distribusi);
5. Keputusan Direksi PLN No. 606/2010 Standar Konstruksi untuk Tegangan Listrik Menengah;
6. Keputusan Direksi PLN No. 605/2010 Standar Konstruksi untuk Gardu Distribusi dan Gardu Pemancar;
7. Peraturan Dewan Direksi No. 501/2012 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
8. Keputusan Direksi PLN No. 0520-2.K/DIR/2014 tentang Pengumpulan Pedoman Perawatan untuk Peralatan Stasiun Utama;
9. Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0250.K/DIR/2016 concerning Occupational Safety Guidelines at PT PLN (Persero);
10. Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0251.K/DIR/2016 concerning Electrical Installation Safety Guidelines at PT PLN (Persero);
11. Directors Regulation of PT PLN (Persero) No. 0252.K/DIR/2016 concerning Public Safety Guidelines at PT PLN (Persero);
12. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 0325.K/DIR/2021 concerning Contractor Safety Management System;
13. Keputusan Direksi PLN (Keputusan PLN) tentang Pengelolaan Sampah FABA dan gypsum;
14. Keputusan Direksi PLN No. 0028.P/DIR/2015 tentang Struktur Organisasi, Tanggung jawab dan Tugas Utama di Direktorat Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero);
15. Keputusan Direksi PLN No. 0250.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Kerja di PT PLN (Persero);
16. Keputusan Direksi PLN No. 0252.P/DIR/2016 tentang Pedoman Keselamatan Publik dalam PT PLN (Persero);
17. Peraturan Direktur PLN No. 0179.P/DIR/2016 tentang Struktur Organisasi;

18. Peraturan Direktur PLN No. 0225.P/DIR/2016 tanggal 24 Mei 2016 dan Keputusan PT PLN (Persero) No. 049/SDM.01.03/DIVORG/2016 tentang Organisasi UIP dan Unit Pelaksana.

B. Social Regulations

Acts

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR);
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dengan perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Government Regulations

1. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2015 tentang Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pemerintahan Lokal;
4. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2018 tentang Mitigasi Dampak Sosial pada Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Presidential Instructions and Regulation

1. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Presiden No. 10/2011 tentang Penangguhan Pemberian Izin Baru dan Peningkatan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut;
3. Instruksi Presiden No. 1/2016 tentang Akselerasi Implementasi Strategi Nasional
4. Peraturan Presiden No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
5. Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan;
6. Peraturan Presiden No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Presiden No. 3/2016 yang mencantumkan Proyek Strategis Nasional.

Ministry Regulations

1. Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Tanah, dengan perubahan Permen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 33 Tahun 2016 Solusi Teknis untuk Tanah, Bangunan, dan/atau Pohon yang Dimiliki oleh Masyarakat di dalam Kawasan Hutan untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 56 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK01/2014 tentang Penilaian Publik, dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.01/2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 Tentang Penilaian Publik;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi untuk Tanah, Bangunan, dan/atau Pabrik di Bawah Ruang Bebas Saluran Transmisi Listrik
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, dengan perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PLN Regulations

1. Keputusan Direksi PLN No. 605 Tahun 2010 tentang Standar Konstruksi untuk Gardu Distribusi Daya dan Gardu Switching;
2. Keputusan Direksi PLN No. 4606 Tahun 2010 tentang Standar Konstruksi untuk Jaringan Tenaga Tegangan Menengah;
3. Keputusan Direksi PLN No. 473 Tahun 2010 tentang Standar Konstruksi untuk Jaringan Listrik Tegangan Rendah;
4. Keputusan Direksi PLN No. 366 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
5. Keputusan Direksi PLN No. 344 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengadaan Tanah di PLN;
6. Keputusan Direksi PLN No. 289 Tahun 2013 tentang Pengadaan Tanah untuk Tujuan Penyediaan Listrik, Biaya Operasional Pengadaan Tanah, dan Biaya Kompensasi Operasional.

Appendix 5: List of Standard Operational Procedure in Distribution Lines Construction

National Regulations and Standards

- a. Indonesian National Standard (SNI) No. 04-0225-2000 concerning Electrical Installations for Buildings;

PLN Standards

- a. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 473.K/DIR/2010 concerning Construction Standards of Low-Voltage Electric Power Networks
- b. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 474.K/DIR/2010 concerning Construction Standards of Electric Power Networks;
- c. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 475.K/DIR/2010 concerning Engineering Design Criteria of Electric Power Distribution Construction;
- d. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 605.K/DIR/2010 concerning Construction Standards of Distribution Substation and Power Switching Substation;
- e. Directors Decree of PT PLN (Persero) No. 606.K/DIR/2010 concerning Construction Standards of Medium Voltage Power;
- f. Procedure No. PT-HSSE-27 concerning Environmental and Social Safeguard Procedures for Distribution Network Works Performed by Third Parties at PT PLN (Persero);

PLN UID Jatim's Internal Procedures

- a. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.DIS.01. Evaluation of Medium Voltage Network Faults
- b. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.01 Inspeksi Gardu Pasangan Dalam
- c. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.02 Inspeksi Gardu Pasangan Luar
- d. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.03 Medium Voltage Network Inspections
- e. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.04 Low Voltage Network Inspections
- f. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.05 Pole Mounted Substation Inspection
- g. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.06 Medium Voltage Network Management
- h. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.07 Low Voltage Network Management
- i. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.08 Pole Mounted Substation Fault Management
- j. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.09 Diesel Power Plant Maintenance
- k. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.10 Diesel Power Plant Operation
- l. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.11 Low Voltage Network Maintenance
- m. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.12 Medium Voltage Network Maintenance
- n. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.JAR.13 Concrete Substation Maintenance
- o. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.KON.01 Supervision Construction for Distribution Network
- p. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.KON.02 Prestressed Concrete Pole Construction
- q. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.HAR.01 Cubicle 20 kV Maintenance
- r. Procedure of PLN UID Jatim No. PK.HAR.05 Digital kWh Meter Maintenance

Appendix 6: Wipe Test Laboratory Test



LABORATORIUM
PT. HYPROWIRA ADHITAMA



SERTIFIKAT HASIL UJI

NO : SHU/223044/08-23

HASIL ANALISA HANYA BERHUBUNGAN TERHADAP SAMPEL YANG DIUJI

Informasi Pelanggan	
Kepada	: PT PLN (Persero) UID Jawa Timur
Alamat	: Jawa Timur
Up	: Bpk. Syifaul Bashori
Tanggal Laporan	: 17 November 2023

Kode Sampel	HA/223 A/23
Tipe Sampel	Hasil Uji Usap Transformator
Titik Sampling	UP3 Madiun, CRB

Informasi Sampel	
Pengambilan Sampel Oleh	: Customer
Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 10 November 2023
Tanggal Pengujian	: 10 – 17 November 2023

Tanggal Sampling	13 Juli 2023
Tipe Peralatan	Kode sampel : Uji Usap 1
	No Seri Peralatan : 92805170
	Tahun : 1993
	Daya : 200 kVA
	Frekuensi : 50 Hz
	Petugas Sampling : BGS

Metode	Analisa	Hasil Uji	Limit		
			Min	Max	Acuan
IEC 61619 : 97	Total PCBs (µg/100 cm ²)	< 0.05	-	10	Permen LHK No.29 Tahun 2020

Note :



LABORATORIUM
PT. HYPROWIRA ADHITAMA



SERTIFIKAT HASIL UJI
NO : SHU/223044/08-23

HASIL ANALISA HANYA BERHUBUNGAN TERHADAP SAMPEL YANG DIUJI

Informasi Pelanggan	
Kepada	: PT PLN (Persero) UID Jawa Timur
Alamat	: Jawa Timur
Up	: Bpk. Syifaul Bashori
Tanggal Laporan	: 17 November 2023

Kode Sampel	HA/223 B/23
Tipe Sampel	Hasil Uji Usap Transformator
Titik Sampling	UP3 Madiun, CRB

Informasi Sampel	
Pengambilan Sampel Oleh	: Customer
Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 10 November 2023
Tanggal Pengujian	: 10 – 17 November 2023

Tanggal Sampling	13 Juli 2023
Tipe Peralatan	Kode sampel : Uji Usap 2 No Seri Peralatan : 853024-79 Tahun : 1987 Daya : 160 kVA Frekuensi : 50 Hz Petugas Sampling : BGS

Metode	Analisa	Hasil Uji	Limit		
			Min	Max	Acuan
IEC 61619 : 97	Total PCBs (µg/100 cm ²)	0.88	-	10	Permen LHK No.29 Tahun 2020

Note :



LABORATORIUM
PT. HYPROWIRA ADHITAMA



SERTIFIKAT HASIL UJI
NO : SHU/223044/08-23

HASIL ANALISA HANYA BERHUBUNGAN TERHADAP SAMPEL YANG DIUJI

Informasi Pelanggan	
Kepada	: PT PLN (Persero) UID Jawa Timur
Alamat	: Jawa Timur
Up	: Bpk. Syifaul Bashori
Tanggal Laporan	: 17 November 2023

Kode Sampel	HA/223 H/23
Tipe Sampel	Hasil Uji Usap Transformator
Titik Sampling	UP3 Kediri, Gd Tulungagung

Informasi Sampel	
Pengambilan Sampel Oleh	: Customer
Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 10 November 2023
Tanggal Pengujian	: 10 – 17 November 2023

Tanggal Sampling	24 Juli 2023
Tipe Peralatan	Kode sampel : Uji Usap 1 No Seri Peralatan : 92703-313 Tahun : 1993 Daya : 160 kVA Frekuensi : - Jenis Peralatan : Trafo bekas offline

Metode	Analisa	Hasil Uji	Limit		
			Min	Max	Acuan
IEC 61619 : 97	Total PCBs (µg/100 cm ²)	< 0.05	-	10	Permen LHK No.29 Tahun 2020

Note :



LABORATORIUM
PT. HYPROWIRA ADHITAMA



SERTIFIKAT HASIL UJI

NO : SHU/223044/08-23

HASIL ANALISA HANYA BERHUBUNGAN TERHADAP SAMPEL YANG DIUJI

Informasi Pelanggan	
Kepada	: PT PLN (Persero) UID Jawa Timur
Alamat	: Jawa Timur
Up	: Bpk. Syifaul Bashori
Tanggal Laporan	: 17 November 2023

Kode Sampel	HA/223 Y/23
Tipe Sampel	Hasil Uji Usap Transformator
Titik Sampling	UP3 Gresik

Informasi Sampel	
Pengambilan Sampel Oleh	: Customer
Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 10 November 2023
Tanggal Pengujian	: 10 – 17 November 2023

Tanggal Sampling	17 Juli 2023
Tipe Peralatan	Kode sampel : 1.2 No Seri Peralatan : - Tahun : 1990 Daya : 160 kVA Frekuensi : - Jenis Trafo : Unindo

Metode	Analisa	Hasil Uji	Limit		
			Min	Max	Acuan
IEC 61619 : 97	Total PCBs (µg/100 cm ²)	1.94	-	10	Permen LHK No.29 Tahun 2020

Note :



LABORATORIUM
PT. HYPROWIRA ADHITAMA



SERTIFIKAT HASIL UJI

NO : SHU/223044/08-23

HASIL ANALISA HANYA BERHUBUNGAN TERHADAP SAMPEL YANG DIUJI

Informasi Pelanggan	
Kepada	: PT PLN (Persero) UID Jawa Timur
Alamat	: Jawa Timur
Up	: Bpk. Syifaul Bashori
Tanggal Laporan	: 17 November 2023

Kode Sampel	HA/223 Z/23
Tipe Sampel	Hasil Uji Usap Transformator
Titik Sampling	UP3 Jember, Gudang UP3 Jember

Informasi Sampel	
Pengambilan Sampel Oleh	: Customer
Metode Sampling	: -
Tanggal Penerimaan Sampel	: 10 November 2023
Tanggal Pengujian	: 10 – 17 November 2023

Tanggal Sampling	18 Juli 2023
Tipe Peralatan	Kode sampel : 07-2023 No Seri Peralatan : - Tahun : 1991 Daya : 250 kVA Petugas Sampling : Arif Setya Nugroho Jenis Trafo : Starlite

Metode	Analisa	Hasil Uji	Limit		
			Min	Max	Acuan
IEC 61619 : 97	Total PCBs (µg/100 cm ²)	0.15	-	10	Permen LHK No.29 Tahun 2020

Note :

Appendix 7: Screening Form

NO.	Nama Kegiatan	Perencanaan								Penapisan			
		Kapasitas (kVA)	Panjang Jaringan (km)		Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Tahun Pelaksanaan	Kawasan Keaneke- ragaman Hayati	Masyarakat Adat (IPs)	Warisan Budaya	Penggunaan Lahan Pribadi
1	PB PENGGILINGAN DAGING SUTARNO (A)	33	0	0.049	NGROWO	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	10 Maret 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	PD BRI UNIT BUNGKAL/AGUS P (A)	23	0.000	0.096	BUNGKAL	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	PB POMPANISASI PILANG (A)	33	0	0.077	PILANGGEDE	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	08 Maret 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	PD SMK BUDI MULYA_105 KVA (A)	105	0	0	SAMBENG	ULP PADANGAN	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	15 Maret 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	PB_KOL_BEKTIHARJO_56600VA (A)	56.6	0.015	0	bektiharjo	ULP TUBAN	TUBAN	JAWA TIMUR	13 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
6	PB_SMARTFREN_6600VA (A)	6.6	0	0.082	SADANG	ULP JATIROGO	TUBAN	JAWA TIMUR	30 Mei 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
7	CV_BANYU_BIRU_ALAM_33000VA (A)	33	0	0.169	MANDER	ULP JATIROGO	TUBAN	JAWA TIMUR	31 Mei 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
8	PB_KANDANG_OKI_16500VA	16.5	0	0.082	BETET	ULP PADANGAN	PADANGAN	JAWA TIMUR	09 Juni 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
9	PB PT PP	131	0.03	0	Brondong	ULP BRONDONG	LAMONGAN	JAWA TIMUR	23 Juni 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
10	PB PR ABABIL LAND 20800VA	20.8	0	0.97	TAKERANKLATING	ULP LAMONGAN	LAMONGAN	JAWA TIMUR	20 Juni 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	PANJI PRATAMA	66	0.028	0	Jl. Veteran	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	26 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
12	ISWATI	10.6	0	0.33	NGAWUN	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	07 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
13	PJSP LOT 2	4330	2.658	0	BOURNO	ULP SUMBERJO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	18 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
14	SRI WAHYUNI	10.6	0	0	TRENGGULUNAN	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	14 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
15	CV TIGA BINTANG SAKTI	33	0.025	0	TROJALU	ULP SUMBERJO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	03 Juli 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
16	PESTA KONSTRUKSI INDONESIA	33	0	0	TLIWENG	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	08 Agustus 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
17	PD KONVEKSI M YUDHA	6.6	0	0.023	Jl.Gajahmada	ULP BOJONEGORO	BOJONEGORO	JAWA TIMUR	13 September 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
18	PT DJIBRIILIAN ALEXA S	41.5	0	1.12	Mudung	ULP BABAT	LAMONGAN	JAWA TIMUR	07 Oktober 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
19	KOL PR TIARA	10.8	0	0.046	Bakalanpule	ULP LAMONGAN	LAMONGAN	JAWA TIMUR	27 September 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
20	SUTRISNO	16.5	0	0.041	Jl.Raya maritup	ULP LAMONGAN	LAMONGAN	JAWA TIMUR	10 Oktober 2023	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

1	Andrian Kurniawan	66000	Dn Pohkeck Ds Baujeng (-7.623724;112.733012)	Beji	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
2	Arief Slamet	10600	Jl Raya Bypass Pandaan (-7.659979;112.692225)	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3	CV Anugrah Ilahi	197000	Dn Raos Baru (-7.557215;112.683506)	Gempol	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
4	CV Harvest Berkah Madani / Deby Afandi	13200	Dn Nyangkring Jl Bangil Pandaan (-7.631724;112.724805)	Beji	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5	CV Karya Berkah Plastindo	197000	Jl Jambu Patebon, Desa Kebonwaris (-7.643080;112.707651)	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
6	Edi Santoso	23000	Dn raos Baru (-7.550113;112.681168)	Gempol	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
7	Harliyani BSC	13200	Jl Jetak (-7.670529;112.704691)	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
8	Hippam Tirta Sumber Urip	6600	Dn Randupitu (-7.625417;112.708518)	Gempol	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
9	P. Rukun	66000	Dn Bareng	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
10	Perum Grand Camry	2200	Tudan Kemiri Sewu Pandaan (-7.637736, 112.718263)	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
11	PT Menara Inti Jaya Group	197000	Jl Surabaya Malang (-7.609640;112.686917)	Gempol	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
12	PT Permata Hlgam Murni	105000	Jl Rambutan Wringinanom (-7.653229;112.700821)	Pandaan	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
13	Lisdes Ngawas Palangsari		1395 Ds Ngawas Palangsari	Puspo	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
14	Dimas Kamarullah	10600	270 Dsn Beji Geneng, Ds Sumbersuko RT 02 RW 01, Purwosari	Purwosari	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
15	Nurul Khusnan		45 Dsn Karang Tengah RT 05 RW 06, Ds Karang rejo, Purwosari	Purwosari	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
16	Solikhin	33000	Parejero - Purwodadi	Purwosari	Kab. Pasuruan	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
17	Jumadi	23000	Jl Raya Surabaya Situbondo KM 135, Sumberrejo - Palton	Palton	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
18	Lisdes Desa Opo-opo		Desa Opo-opo, Kec. Krejengan	Krejengan	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
19	Mahfud	33000	Dsn Krajan RT 06 RW 01, Ds Glagah, Kec. Pakuniran - Probolinggo	Pakuniran	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
20	Nur Fadilah		Dsn Krajan RT 01 RW 01, Ds Glagah, Kec. Pakuniran - Probolinggo	Pakuniran	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
21	Herman Permadi	16500	Ds Kramat Karang Geger, Pajajaran	Pajajaran	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
22	Perum Sudirman Residence	19500	Jl. Raya Panglima Sudirman No 01 RT 01 RW 01, Kebon Agung - Kraksaan	Kraksaan	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
23	Perum Samawa View	66000	Desa Randu Merak, Kec Palton - Probolinggo	Palton	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
24	SCTV 1	10600	Dsn Klembun Timur RT 01 RW 01, Ds Ranon, Kec. Pakuniran - Probolinggo	Pakuniran	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
25	Agus Priyono		Jl Raya Palton, Sumberrejo-Palton	Palton	Kab. Probolinggo	JAWA TIMUR	2023	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

1	PR GRIYA ARDHYA GARINI	250.0	0.498	0.527	DS SURATMAJAN MAOSPATI MAGETAN	DS SURATMAJAN MAOSPATI MAGETAN	DS SURATMAJAN MAOSPATI MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
2	PR BUMI SUKOLILO	160.0	0.102	0.470	DS SUKOLILO KEC. JIWAN	DS SUKOLILO KEC. JIWAN	DS SUKOLILO KEC. JIWAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
3	RPA ARJUANA TAHAP 2 BAMBANG SUJARWANTO	250.0	0	0	DS MADIGONDO KEC. TAKERAN MAGETAN	DS MADIGONDO KEC. TAKERAN MAGETAN	DS MADIGONDO KEC. TAKERAN MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
4	PT AMANAH GENERAL TRADING	160.0	0	0	JL. RAYA MULIR 23/3 DOLOPO	JL. RAYA MULIR 23/3 DOLOPO	JL. RAYA MULIR 23/3 DOLOPO	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
5	SIMAN/PENGGILINGAN PADI	160.0	0.03	0	DN. WATUGUDEL 13/4 DS. PITU NGAWI	DN. WATUGUDEL 13/4 DS. PITU NGAWI	DN. WATUGUDEL 13/4 DS. PITU NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
6	PONPES AL FATAH PUTRI	100.0	0	0	DS. TEMBORO RT 9/2 KARAS	DS. TEMBORO RT 9/2 KARAS	DS. TEMBORO RT 9/2 KARAS	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
7	PEMECAH BATU KHOMARUDDIN	160.0	0	0	JL RAYA BATIL BANGUNSARI DOLOPO	JL RAYA BATIL BANGUNSARI DOLOPO	JL RAYA BATIL BANGUNSARI DOLOPO	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
8	PT PP URBAN (PASAR BESAR NGAWI)	250.0	0.39	0	JL. SULTAN AGUNG KEL. KETANGGI	JL. SULTAN AGUNG KEL. KETANGGI	JL. SULTAN AGUNG KEL. KETANGGI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
9	SUGIYANTO CS	200.0	0.627	0.735	DK TANJUNGREJO DN KAYUTREJO	DK TANJUNGREJO DN KAYUTREJO	DK TANJUNGREJO DN KAYUTREJO	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
10	SUTRISNO CS DARSONO	100.0	0	1.388	DN BLIMBING DS. DAWU KEC. PARON	DN BLIMBING DS. DAWU KEC. PARON	DN BLIMBING DS. DAWU KEC. PARON	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
11	RADIAS FURRY WIDYANTARI/KANDANG	160.0	0	0	DK. KASREMAN NGAWI	DK. KASREMAN NGAWI	DK. KASREMAN NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
12	PR DIAN WIRAJAYA REGENCY	200.0	0.676	0.152	DS BUDUG KEC KWADUNGAN	DS BUDUG KEC KWADUNGAN	DS BUDUG KEC KWADUNGAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
13	BISRI MUSTOFA CS	100.0	0	0.256	DN PALDAPLANG DS KAUMAN	DN PALDAPLANG DS KAUMAN	DN PALDAPLANG DS KAUMAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
14	PASAR BARU DS KEBONAGUNG	160.0	0	0	DS. KEBONAGUNG MAGETAN	DS. KEBONAGUNG MAGETAN	DS. KEBONAGUNG MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
15	PR NIRWANA LAND	100.0	0	0.283	DS KANUNG KEC. SAWAHAN	DS KANUNG KEC. SAWAHAN	DS KANUNG KEC. SAWAHAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
16	POMPA AIR DS KRANGGAN	2x100	1.348	2.472	DS KRANGGAN RT 4/2	DS KRANGGAN RT 4/2	DS KRANGGAN RT 4/2	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
17	POMPA KEL TANI RAHAYU (DEDIK SETIAWAN)	100.0	0.427	0.69	DN BANTENGAN BAKUR SAWAHAN	DN BANTENGAN BAKUR SAWAHAN	DN BANTENGAN BAKUR SAWAHAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
18	PABRIK PLASTIK PT SAMIPLAST		0.01	0	DS TIRON KEC./KAB. MADIUN	DS TIRON KEC./KAB. MADIUN	DS TIRON KEC./KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
19	KANDANG AYAM SISWATI&PUTUT	160.0	1.031	0.052	DN JATEN DS. KRAJAN KEC. PARANG	DN JATEN DS. KRAJAN KEC. PARANG	DN JATEN DS. KRAJAN KEC. PARANG	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
20	SUDARTO CS KRISJON	200.0	0.689	1.126	DN BINTOYO RT 3/1 BINTOYO	DN BINTOYO RT 3/1 BINTOYO	DN BINTOYO RT 3/1 BINTOYO	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

21	SAMILAN CS	200.0	0.511	1.397	DN BUNGUR RT 13/3 DS GELUNG	DN BUNGUR RT 13/4 DS GELUNG	DN BUNGUR RT 13/5 DS GELUNG	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
22	POLITEKNIK NEGERI MADIUN		0.019	0	JL. RINGROAD BARAT MADIUN	JL. RINGROAD BARAT MADIUN	JL. RINGROAD BARAT MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
23	RSUD GENENG KAB NGAWI	200.0	0.036	0	JL RAYA NGAWI, GENENG	JL RAYA NGAWI, GENENG	JL RAYA NGAWI, GENENG	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
24	PARSITO CS MAMAD	250.0	1.19	2.042	DS SIDOREJO RT 1/2 KEC GENENG	DS SIDOREJO RT 1/2 KEC GENENG	DS SIDOREJO RT 1/2 KEC GENENG	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
25	MULYONO CS MAMAD	100;160	1.705	2.086	DN NGUBALAN RT 1/5 DS BANJARBANGI	DN NGUBALAN RT 1/5 DS BANJARBANGI	DN NGUBALAN RT 1/5 DS BANJARBANGI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
26	TEFA SMK YOSONEGORO	160.0	0	0	JL. TRIPANDITA SUKOWINANGUN MAGETAN	JL. TRIPANDITA SUKOWINANGUN MAGETAN	JL. TRIPANDITA SUKOWINANGUN MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
27	PR GREEN INDAH SANIKA BHAYANGKARA	250.0	0.156	0.512	JL RAYA SIDOMULYO SAWAHAN	JL RAYA SIDOMULYO SAWAHAN	JL RAYA SIDOMULYO SAWAHAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
28	PT IMS TRADING CENTER	100.0	0.03	0	JL. RAYA RINGROAD BARAT MADIUN	JL. RAYA RINGROAD BARAT MADIUN	JL. RAYA RINGROAD BARAT MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
29	SUMUR POMPA SUPRAPNO CS	250.0	0.321	0.742	DS TANJUNGREJO KEC/KAB. MADIUN	DS TANJUNGREJO KEC/KAB. MADIUN	DS TANJUNGREJO KEC/KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
30	PABRIK ES KRISTAL CHASANA	160.0	0.118	0	DN. PENCOL CANGAKAN NGAWI	DN. PENCOL CANGAKAN NGAWI	DN. PENCOL CANGAKAN NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
31	SUMUR BOR GODONGAN 2	160.0	0	0	DS. PURWOREJO KEC. GEGER	DS. PURWOREJO KEC. GEGER	DS. PURWOREJO KEC. GEGER	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
32	SUMUR PDAM MOJOPURNO 2	100.0	0	0.036	DS. MOJOPURNO MAGETAN	DS. MOJOPURNO MAGETAN	DS. MOJOPURNO MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
33	EKO WHINARTO 2/OLAH BERAS	200.0	0	0	DN. MENDALAN DS. KEDUNGPRAHU KEC. PADAS NGAWI	DN. MENDALAN DS. KEDUNGPRAHU KEC. PADAS NGAWI	DN. MENDALAN DS. KEDUNGPRAHU KEC. PADAS NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
34	PDAM NGRAYUDAN	100.0	0	0.346	DS. NGRAYUDAN KEC. JOGOROGO KAB. NGAWI	DS. NGRAYUDAN KEC. JOGOROGO KAB. NGAWI	DS. NGRAYUDAN KEC. JOGOROGO KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
35	SUWAJI/DWI Rianto JATMIKO CS	160.0	0.404	0.656	DN. GEBANGSEWU DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. GEBANGSEWU DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. GEBANGSEWU DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

36	POMPA MOH SOLEH CS	100.0	0	0.479	DS. KALIGUNTING KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	DS. KALIGUNTING KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	DS. KALIGUNTING KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
37	SUDIBYO CS/POMPA	250.0	0.766	0.71	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
38	IBNU WARSITO CS	100.0	0	0.92	DN. TEMPEL DS. TEGUHAN KEC. PARON	DN. TEMPEL DS. TEGUHAN KEC. PARON	DN. TEMPEL DS. TEGUHAN KEC. PARON	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
39	KASIONO CS/GENDUT	250.0	0.334	1.092	DN. SUREN DS. JENANGAN KEC. KWADUNGAN	DN. SUREN DS. JENANGAN KEC. KWADUNGAN	DN. SUREN DS. JENANGAN KEC. KWADUNGAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
40	TAUPAN DEVIYANTO/WATERBOOM	160.0	0	0.05	DS. MOJOPURNO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. MOJOPURNO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. MOJOPURNO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
41	POMPES TRANGKIL 2	200.0	0.144	0	DS. TEMBORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN	DS. TEMBORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN	DS. TEMBORO KEC. KARAS KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
42	ARIS RIANITO CS/POMPA	160.0	0.474	0.716	DS. BINTOYO KEC. PADAS KAB. NGAWI	DS. BINTOYO KEC. PADAS KAB. NGAWI	DS. BINTOYO KEC. PADAS KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
43	BEDJO CS/POMPA	160.0	0.835	0.743	DN. SEKARJO DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	DN. SEKARJO DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	DN. SEKARJO DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
44	WANTORO CS/POMPA	100.0	0.276	0.572	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SOBRAH KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
45	SUDARSONO CS/POMPA	250.0	0.454	1.179	DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
46	RS LAPANGAN DUNGUS	250.0	0.039	0	DN. DUNGUS KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DN. DUNGUS KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DN. DUNGUS KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
47	TEGUH WAHYU WIDODO CS	250.0	0.224	0.873	DN. BULAKREJO DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. BULAKREJO DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. BULAKREJO DS. SEMEN KEC. PARON KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
48	SUGIYANTO/KANDANG	160.0	0.421	0.888	DS. PURWOREJO KEC. NGUTORONADI KAB. MAGETAN	DS. PURWOREJO KEC. NGUTORONADI KAB. MAGETAN	DS. PURWOREJO KEC. NGUTORONADI KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
49	TOSO CS/ARYO(POMPA)	200.0	0.294	0.783	DN. NGESREP DS. PARAS KEC. PANGKUR KAB. NGAWI	DN. NGESREP DS. PARAS KEC. PANGKUR KAB. NGAWI	DN. NGESREP DS. PARAS KEC. PANGKUR KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
50	SUYOTO CS/POMPA		0.438	1.484	DS. SIDOREJO KEC. SARADAN KAB. MADIUN	DS. SIDOREJO KEC. SARADAN KAB. MADIUN	DS. SIDOREJO KEC. SARADAN KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

51	MAHMUD CS/POMPA		0.44	1.213	DS. SUKOLILO KEC. JIWAN KAB. MADIUN	DS. SUKOLILO KEC. JIWAN KAB. MADIUN	DS. SUKOLILO KEC. JIWAN KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
52	WELLY SUKOCO/PABRIK PLASTIK	100.0	0	0.073	JL. SIDOMAKMUR DS./KEC. BABADAN KAB. PONOROGO	JL. SIDOMAKMUR DS./KEC. BABADAN KAB. PONOROGO	JL. SIDOMAKMUR DS./KEC. BABADAN KAB. PONOROGO	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
53	PR VILLA PUSAKA MULIA	250.0	0	1.026	DN. ALASTUWO DS. BALEGONDO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	DN. ALASTUWO DS. BALEGONDO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	DN. ALASTUWO DS. BALEGONDO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
54	SUPRIYONO CS/POMPA	100.0	0	0.698	DS. TANJUNG KEC. BENDO KAB. MAGETAN	DS. TANJUNG KEC. BENDO KAB. MAGETAN	DS. TANJUNG KEC. BENDO KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
55	RIKA WAHYU SULISTYOWATI/KANDANG	200.0	0	0	DS. BANTENGAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. BANTENGAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. BANTENGAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
56	WASITO CS/POMPA	2x200	1.396	3.575	DN. DONGOL DS. KLAMPISAN KEC. GENENG KAB. NGAWI	DN. DONGOL DS. KLAMPISAN KEC. GENENG KAB. NGAWI	DN. DONGOL DS. KLAMPISAN KEC. GENENG KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
57	YONO CS/ARYO(POMPA)	250.0	0.7	1.772	DS. JENGGRIK KEC. KEDUNGALAR KAB. NGAWI	DS. JENGGRIK KEC. KEDUNGALAR KAB. NGAWI	DS. JENGGRIK KEC. KEDUNGALAR KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
58	PABRIK GULA SOEDHONO (REKON 2)		0.607	0	DS. GENENG KEC. GENENG KAB. NGAWI	DS. GENENG KEC. GENENG KAB. NGAWI	DS. GENENG KEC. GENENG KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
59	TUKIJAN CS/POMPA	100.0	0.706	1.339	DS. GRUDO KEC. NGAWI KAB. NGAWI	DS. GRUDO KEC. NGAWI KAB. NGAWI	DS. GRUDO KEC. NGAWI KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
60	POMPA TUMIRAN CS	100.0	0.14	0.96	DS. PRAGAK KEC. PARANG KAB. MAGETAN	DS. PRAGAK KEC. PARANG KAB. MAGETAN	DS. PRAGAK KEC. PARANG KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
61	YATNO CS/POMPA	250.0	0.855	1.786	DS. KEDUNGBANTEN G KEC. PILANGKENCEN G KAB. MADIUN	DS. KEDUNGBANTEN G KEC. PILANGKENCENG KAB. MADIUN	DS. KEDUNGBANTEN G KEC. PILANGKENCENG KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
62	SUKAR CS/POMPA	160.0	1.066	1.393	DS. SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	DS. SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	DS. SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
63	POMPA AIR DESA SAMBIREJO	200.0	0.810	1.24	DS. SAMBIREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN	DS. SAMBIREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN	DS. SAMBIREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
64	PT PEI HAI INTERNATIONAL	250.0	0	0	DS. DUNGMIRO KEC. KARANGJATI KAB. NGAWI	DS. DUNGMIRO KEC. KARANGJATI KAB. NGAWI	DS. DUNGMIRO KEC. KARANGJATI KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
65	WASIRIN CS/POMPA	200.0	0.666	1.973	DS. DIMONG KEC. MADIUN KAB. MADIUN	DS. DIMONG KEC. MADIUN KAB. MADIUN	DS. DIMONG KEC. MADIUN KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

66	CV MAKMUR RAYA SEJAHTERA	200.0	0.14	0	JL. PURUBAYA BARAT KEL. TAWANGANOM KAB. MAGETAN	JL. PURUBAYA BARAT KEL. TAWANGANOM KAB. MAGETAN	JL. PURUBAYA BARAT KEL. TAWANGANOM KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
67	IMAM MASRURI CS/POMPA	200.0	0.463	0	DS. SIRAPAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SIRAPAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SIRAPAN KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
68	KOLEKTIF EKO CS/POMPA	2x250	0.851	1.7	DN. CENGGRENGAN DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. CENGGRENGAN DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	DN. CENGGRENGAN DS. JEBLOGAN KEC. PARON KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
69	SUTRISNO(EX. DEMIN CS)/POMPA	250.0	0.872	1.704	DN. JENAK DS. BANYUBIRU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	DN. JENAK DS. BANYUBIRU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	DN. JENAK DS. BANYUBIRU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
70	SELEP PADI SUPOYO	100.0	0.24	0	DS. PUCANGANOM KEC. KEBONSARI KAB. MADIUN	DS. PUCANGANOM KEC. KEBONSARI KAB. MADIUN	DS. PUCANGANOM KEC. KEBONSARI KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
71	SMK YKP MAGETAN	160.0	0.025	0	DS. MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	DS. MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	DS. MOJOPURNO KEC. NGARIBOYO KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
72	ISWAHYUDI CS/POMPA	250.0	0	0	DN. KUNCEN DS. TAMBAKROMO KEC. PADAS KAB. NGAWI	DN. KUNCEN DS. TAMBAKROMO KEC. PADAS KAB. NGAWI	DN. KUNCEN DS. TAMBAKROMO KEC. PADAS KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
73	KANDANG AYAM M ISHOMUDIN	100.0	0.106	0	JL. M HASANUDIN DS. MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN	JL. M HASANUDIN DS. MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN	JL. M HASANUDIN DS. MLILIR KEC. DOLOPO KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
74	KANDANG AYAM YOGA ASMARA	100.0	1.638	0	DS. SIDOREJO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SIDOREJO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	DS. SIDOREJO KEC. WUNGU KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
75	CV. MULTI PAYMENT NUSANTARA	100.0	0	0	DS. DRIYOREJO KEC. NGUNTORONADI KAB. MAGETAN	DS. DRIYOREJO KEC. NGUNTORONADI KAB. MAGETAN	DS. DRIYOREJO KEC. NGUNTORONADI KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
76	KANDANG AYAM SAMAD		0.552	0	DN. SETRO DS. JATIREJO KEC. KASREMAN KAB. NGAWI	DN. SETRO DS. JATIREJO KEC. KASREMAN KAB. NGAWI	DN. SETRO DS. JATIREJO KEC. KASREMAN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

77	RSU KABUPATEN NGAWI		0.273	0	JL. DR WAHIDIN NO. 64 DS. KARANGTENGGAH KEC./KAB. NGAWI	JL. DR WAHIDIN NO. 64 DS. KARANGTENGGAH KEC./KAB. NGAWI	JL. DR WAHIDIN NO. 64 DS. KARANGTENGGAH KEC./KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
78	PT GUDANG GARAM TBK-MPGG	200.0	0.035	0	JL. RAYA MAOSPATI DS. PRAMPILAN KEC. KARANGREJO KAB. MAGETAN	JL. RAYA MAOSPATI DS. PRAMPILAN KEC. KARANGREJO KAB. MAGETAN	JL. RAYA MAOSPATI DS. PRAMPILAN KEC. KARANGREJO KAB. MAGETAN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
79	GEDUNG KAMPUS UNS	200.0	0.026	0	JL. IMAM BONJOL KEL. PANDEAN KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	JL. IMAM BONJOL KEL. PANDEAN KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	JL. IMAM BONJOL KEL. PANDEAN KEC. MEJAYAN KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
80	RUMAH SAKIT MANTINGAN		0.03	0	DN. PULE DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	DN. PULE DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	DN. PULE DS./KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
81	PT WIDODO MAKMUR UNGGAS	250.0	0.38	0	JL. TOL SOLO-NGAWI SAWAH SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	JL. TOL SOLO-NGAWI SAWAH SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	JL. TOL SOLO-NGAWI SAWAH SIDOLAJU KEC. WIDODAREN KAB. NGAWI	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
82	CV SUKSES JAYA ABADI		0.023	0	JL. RAYA WONOASRI - MADIUN DS./KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	JL. RAYA WONOASRI - MADIUN DS./KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	JL. RAYA WONOASRI - MADIUN DS./KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
83	UD SUMBER ASRI SEJAHTERA		0.022	0	DS. KLITIK KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	DS. KLITIK KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	DS. KLITIK KEC. WONOASRI KAB. MADIUN	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak
84	PT WILMAR PADI INDONESIA (NEW PARON)		0.227	0	DS. KARANGTENGGAH PRANDON	DS. KARANGTENGGAH PRANDON	DS. KARANGTENGGAH PRANDON	JATIM	2022	tidak	tidak	tidak	tidak

Appendix 8: ROW Safety Distance and Socialisation Notes



Appendix 9: Sign, Personal Protective Equipment



Appendix 10: Material arrangement with 5S rules



Appendix 11: No oil seepage from transformation and empty transformation



Appendix 12: Materials Control Application (In and Out) and Materials Warehouses

Pengelolaan Material Return							
Klasifikasi Material (Qty)							
Unit	Jml Inspeksi	Standby	Gurami	Perbaikan	Usul Hapus	Asuransi	
UP3 Pasuruan	24.113	191	2	0	23.920	0	
UP3 Stabondo	581.911	210	2	12	581.687	0	
UP3 Banyuwangi	727	548	2	6	171	0	
UP3 Jember	135.599	1.780	124	6	133.689	0	
UP3 Malang	14.200	4.872	0	2	9.326	0	
UP3 Kediri	65.916	387	1	5	65.523	0	
UP3 Madiun	7.260	56	0	6	7.198	0	
UP3 Mojokerto	22.735	1.105	0	0	21.630	0	
UP3 Pamekasan	20.586	57	0	0	20.529	0	
UP3 Surabaya Utara	36.738	123	0	5	36.610	0	
UP3 Surabaya Selatan	138.804	7.910	1	24	130.869	0	
UP3 Bojonegoro	146.588	29.727	2	3	116.856	0	
UP3 Sidoarjo	32.269	412	0	5	31.852	0	
UP3 Gresik	127.435	1.237	0	6	126.192	0	
UP3 Ponorogo	42.386	14.646	0	7	27.733	0	
UP3 Surabaya Barat	30.176	1.350	1.145	11	27.667	3	
UP2D Jati	81	2	0	1	78	0	
Jumlah	1.427.523	64.613	1.279	99	1.361.530	3	
Persentase	100%	4.53%	0.09%	0.01%	95.38%	0.00%	

PENATAAN MATERIAL PDP / BARU



PENATAAN MATERIAL MRWI / BEKAS

